

**KONSEP KETUHANAN DALAM FALSAFAH
PANCASILA: STUDI PEMIKIRAN
ABDURRAHMAN WAHID**

Oleh :

**Akhiruddin Syam
NIM:20.9.1.211.002**

Pembimbing :

Waode Zainab Zilullah Toresano, Ph.D.

Diajukan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA JAKARTA
2026**


**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Akhiruddin Syam
NIM : 20.9.1.211.002
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
**Judul : KONSEP KETUHANAN DALAM FALSAFAH
PANCASILA: STUDI PEMIKIRAN
ABDURRAHMAN WAHID**

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:


Abdullah Beik
(Ketua Sidang/Penguji I)


Tanggal: 12/2/2026

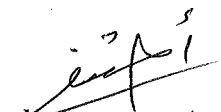
Nano Warno, Ph. D
(Penguji II)


Tanggal: 03/02/26

Waode Zainab Zilullah Toresano, Ph.D.
(Dosen Pembimbing)


Tanggal: 07/02/26

Ahmad Hafidh Alkaf, M.A
(Sekertaris Sidang)


Tanggal: 09/02/26

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya yang tidak terhitung, mulai dari nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan serta yang paling utama ialah nikmat iman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, serta pengikutnya yang setia yang terus mendukung dan bersamasama memperjuangkan tegaknya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga keluarlah manusia dari alam kejahilan dan kebodohan yang gelap gulita, menuju alam yang terang benderang dipenuhi cahaya ilmu dan iman.

Peneliti menyadari bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna dan tentunya sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan khazanah keilmuan, khususnya bagi bangsa dan negara yang sangat praktikan cintai ini. Tidak terlepas dari itu semua, peneliti mengakui bahwa karya ini tidak akan hadir di hadapan pembaca, tanpa ada semangat dan dukungan dari orang-orang hebat, mereka semua telah berkontribusi memberikan apapun yang mereka bisa, hingga meluangkan waktu dan pemikirannya demi untuk mendukung praktikan agar dapat menyelesaikan karya ini. Dengan demikian, praktikan mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada:

1. Direktur Yayasan Hikmat Al-Musthafa Jakarta, Prof. Dr. Hossein Mottaghi yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan di STAI Sadra.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Dr. Otong Sulaeman, M. Hum. atas izin dan dukungan beliau dalam menjalankan penelitian ini.
3. Waode Zainab Zilullah Toresano, Ph.D, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-dosen yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

5. Terima kasih kepada semua individu yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan.
6. Teman-teman senasib seperjuangan di kelas Aqidah Filsafat Islam (AFI) dan Ilmu Al-Qur'an Tafsir (IAT) 2020.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah (Syamsul Bahri), seorang kesatria yang senantiasa menjadi motivasi terbesar, dan serta pengalaman hidup yang tidak saya dapatkan di luar sana. Kemudian Ibu (Hj. Murni) yang merupakan malaikatku, yang tidak hanya konsisten memberikan semangat, cinta, doa dan dukungan penuh kepada peneliti.
8. Kepada seluruh keluarga yang selalu membantu men-*support* dan mendoakan saya di manapun saya berada. Cinta dan dukungan mereka adalah segalanya di dunia ini.

Dengan doa dan dukungan yang tulus, akhirnya proses penelitian skripsi ini telah mencapai penyelesaian. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah berkontribusi dengan balasan yang tak terhingga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 14 Januari
2026



Akhiruddin Syam

**KONSEP KETUHANAN DALAM FALSAFAH PANCASILA:
STUDI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID**

Disusun oleh:
Akhiruddin Syam
NIM: 20.9.1. 211.002

Pembimbing:
Waode Zainab Zilullah Toresano, Ph.D.

Diajukan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk apapun sebagaimana kebijakan kampus STAI Sadra

Jakarta, Januari 2026



Akhiruddin Syam

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Akhiruddin Syam

NIM : 20.9.1.211.002

Prodi : Aqidah Filsafat Islam

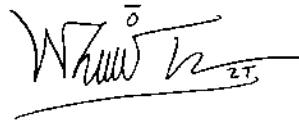
Judul : **KONSEP KETUHANAN DALAM FALSAFAH**

PANCASILA: STUDI PEMIKIRAN

ABDURRAHMAN WAHID

Telah disetujui untuk diajukan kepada dewan tesis STAI Sadra untuk disidangkan pada sidang Skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 14 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'WZ' followed by a flourish and 'Z.T.' at the bottom right.

Waode Zainab Zilullah Toresano, Ph.D.

Pembimbing Skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	: ā = آ	ī = إِي	ū = أُ
Diftong	: ay = أَي	aw = أَوْ	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *qūwwāh*. Adapun, jika tasydid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عدوّ ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين ditulis *Jalāluddīn*.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai Ketuhanan dalam Pancasila menjadi penting dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk secara agama dan keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang inklusif dan tidak reduktif agar sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai landasan etis bersama. Fokus penelitian ini adalah Konsep Ketuhanan Dalam Falsafah Pancasila: Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menganalisis karya-karya, buku dan pemikiran. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yang berfokus pada pada suatu tema khusus menggali pandangan Gus Dur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. penelitian ini menggunakan metode (library research) atau studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa tidak boleh dipahami secara eksklusif keagamaan, tetapi justru harus inklusif bersifat bukan hanya pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam, tetapi juga mendorong manusia untuk menyadari keterhubungan dalam kehendak Tuhan yang sama. Karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang satu, maka keberagaman agama, suku, dan budaya adalah kehendak Tuhan, bukan sesuatu yang harus ditolak. Berdasarkan perspektif Gus Dur, Konsep Ketuhanan Dalam Falsafah Pancasila antara lain: *Pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. justru merepresentasikan pengalaman keberagaman yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama. Kedua Istilah “Esa” dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 pun pada akhirnya dipahami secara berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing agama.*

Kata-kata Kunci: *Ketuhanan, Pancasila, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Hubungan Agama dan Negara*

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Masalah.....	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Penelitian	18
BAB II Biografi dan Konsep-konsep Dasar Pemikiran Gus Dur	
A. Biografi	
1. Latar Belakang Keilmuan	20
2. Karya-karya	28
3. Kiprah Politik	30
4. Kiprah Agama	35
B. Konsep-konsep Dasar	37
1. Islam	37
2. Negara	40
3. Ketuhanan	44
BAB III Prinsip-prinsip Falsafah Pancasila menurut Gus Dur	
A. Prinsip-prinsip Pemikiran Gus Dur	49
1. Pribumisasi Islam.....	49
2. Pluralisme	52
3. Universalisme Islam	55
B. Pemikiran Falsafah Pancasila Gus Dur.....	60
1. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa.....	60
2. Penafsiran Masing-masing Sila dalam Pancasila	63

BAB IV Implementansi Nilai Ketuhanan dalam Perpektif Gus Dur	
A. Sila Pertama dalam Pancasila menurut Perspektif Gus Dur.....	70
1. Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila	70
2. Tafsir Filosofis Gus Dur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa	73
3. Dimensi Universal Sila Pertama	79
B. Konsep Keberagaman dan Pluralisme Agama dalam Pandangan Gus Dur	81
1. Konsep Tauhid Inklusif	81
2. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman	83
C. Implementasi Nilai Ketuhanan dalam Konteks Bernegara	85
1. Penerapan Nilai Toleransi dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan	85
2. Hubungan Agama dan Negara (Aplikasi Sila Pertama)	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Kritik dan Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bernegara, setiap negara memerlukan pedoman untuk mengatur sistem tata negara. Ketika terjadi pertentangan, pedoman ini digunakan sebagai acuan penyelesaian. Indonesia, dengan beragam agama, sering mengalami dialektika pemikiran yang mengarah kepada konflik ideologis, terutama pasca kemerdekaan. Pancasila merupakan dasar negara yang dianut Indonesia, terdapat lima sila pada Pancasila. Semua ini tercantum pada alenia keempat UUD 1945 dan telah memainkan peran dalam membangun sistem hukum, pemerintah, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia.¹

Pada awalnya, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Namun, kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." karena memang dalam perumusannya terdapat beberapa dialektika antara kelompok-kelompok yang tidak sepakan akan sila pertama dan minta di revisi.² Di masa orde lama, pancasila dibawah pengasuhan Soekarno, terdapat paham komunis yang berkembang, paham inilah dianggap yang bertentangan dengan Pancasila, sebab Soekarno menganut Pancasila dalam tafsiran nasionalis, agama, dan komunis.³

¹ Durriyya Senja Tiarylla, dkk, "Pancasila Sebagai Dasar Negara di Indonesia" *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2023) hal. 277

² Bung Hatta dalam Merevisi Sila "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya" <https://www.unud.ac.id/in/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya->, di akses tanggal 28 Juni 2024

³ Wira Atma Hajri, dkk, "Meluruskan Penaafsiran Tentang Pancasila" *Jurnal Wedana*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2019) hal. 51

Pada Era Reformasi, pemaknaan terhadap Pancasila mengalami pergeseran seiring dengan perubahan iklim politik dan sosial. Kebebasan politik membuka ruang bagi partai politik serta organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Islam sebagai asas ideologisnya. Bersamaan dengan itu, corak pemikiran sekuler dan liberal juga menunjukkan perkembangan yang semakin menguat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, pemisahan antara agama dan politik dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual, demokrasi yang berlebihan, penolakan terhadap syariah, dan lain-lain.⁴

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah konsep yang diakui Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.⁵ Namun, kita juga perlu menyadari bahwa Indonesia memiliki berbagai agama, masing-masing dengan ajaran dan keyakinan terhadap Tuhan yang berbeda-beda. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah Tuhan dari semua agama tersebut adalah satu entitas yang sama atau entitas yang berbeda-beda.

Inilah kemudian penulis ingi mencari tahu lebih dalam makna dari Ketuhanan, maka dari itu terlebih dahulu kita perlu pahami dan mencari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, dan harus ada menjadi kesepakatan antara berbagai golongan masyarakat. Dalam konteks ini, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi penting mengatur interaksi antara kehidupan beragama dan negara. Dalam pemikiran Gus Dur konsep ini bukan sekedar klaim normatif, namun juga menuntun pemahaman yang mendalam mengenai keberagaman dan toleransi di Indonesia.

⁴ Nabila Atihyah Rohmah, "Politik Eksklusif : Deradikalisme Fundamental Agama di Kalangan Mahasiswa" <https://politik.fisip.unair.ac.id/politik-eksklusif-deradikalisme-fundamentalis-agama-di-kalangan-mahasiswa> di akses tanggal 28 Juni 2024.

⁵ Siregar, dkk, "Pembinaan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan yang Maha Esa Eks Pengguna Narkoba untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi." *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1.2 (2022) hal. 46.

Pancasila, Sebagai ideologi bangsa Pancasila mengikat warga negara untuk menghormati dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi sebagai kerangka pemikiran dalam penyusunan hukum dan kebijakan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya bersifat ilegal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

Memang dalam kehidupan beragama seringkali terjadi tumpang tindih, bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan antara agama. Inilah kemudian dapat ditunjukkan oleh Gus Dur bahwa terdapat tantangan dalam menerapkan Pancasila mengupayakan penekanan sikap inklusif dan toleran antara berbagai agama dan kepercayaan. Namun, setiap agama memiliki eksklusivitasnya masing-masing yang terkadang sulit untuk diselaraskan dengan semangat Pancasila. oleh karena itu, Pancasila diharapkan dapat berfungsi sebagai “polisi lalu lintas” dalam kehidupan beragama, tanpa mengurangi hak-hak dan kedaulatan masing-masing agama.⁷

Maka dari itu, peran Pancasila dalam mengatur perbedaan memang sangat penting, salah satu tantangan utama adalah menemukan titik temu antara nilai-nilai Pancasila dan pandangan agama-agama yang berbeda. Untuk menemukan titik temu dari persoalan ini Gus Dur dalam pemikirannya menekankan pentingnya dialog antaragama untuk mencapai kesepahaman dan saling menghormati. Misalnya, dalam konteks Islam, terdapat pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang terkadang berkonflik dengan ide kesetaraan semua agama.

⁶ Saefur Rochamt “Pandangan KH Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Negara Pancasila” *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan*, No. 070, September 2022, hal. 184

⁷ Oetoyo Oesman dan Alfian, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” BP-7 Pusat (Jakarta: 1990), hal. 164

Oleh karena itu, Pancasila harus mampu menawarkan solusi yang tidak mengganggu kedaukatan teologis masing-masing agama.⁸

Dalam konteks hubungan antara agama dan Pancasila dan agama-agama, Gus Dur mendorong kita untuk terus mencari nilai-nilai dasar yang dapat menyatukan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menghormati perbedaan yang ada. Pendekatan ini tidak hanya akan menjaga keharmonisan, tetapi juga mendorong perkembangan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Untuk memahami ini, kita perlu membedakan antara esensi dan ekspresi. Esensi merujuk pada hakekat atau inti dari sesuatu, sementara ekspresi adalah cara bagaimana esensi tersebut diwujudkan atau ditampilkan. Dalam konteks Ketuhanan, esensi dari Tuhan dalam banyak agama adalah satu, yaitu entitas yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. Namun, ekspresi dari keyakinan ini berbeda-beda sesuai dengan tradisi, budaya, dan sejarah masing-masing agama.

Namun, sebagian besar pemahaman teologis dan filosofis mencoba menjelaskan bahwa meskipun ekspresi dan pemahaman tentang Tuhan bisa berbeda-beda, esensi dari Tuhan tetaplah satu dan sama.⁹ Dalam konteks ini, "Tuhan Yang Maha Esa" merujuk pada keyakinan bahwa pada hakekatnya, ada satu kekuatan ilahi yang menjadi sumber dari segala sesuatu, meskipun cara kita memahami dan menyembah kekuatan ini dapat bervariasi.

Peneliti juga ingin menyelidiki bagaimana agama-agama lain memberikan interpretasi terhadap makna sila Ketuhanan

⁸ Mawarni Napitupulu "Peran Kitab Keagamaan (Alkitab) Sebagai Upaya Membangun Toleransi Dalam Konflik Umat Beragama di Indonesia" *Jurnal Christian Humaniora*, Vol.6, No. 1, (Mei 2022) hal.152

⁹ Gege Agus Siswadi, "Argumentasi Logis Tentang Eksistensi Tuhan dalam Wacana Filsafat Ketuhanan", *Jurnal Filsafat Sanjiwani*, Vol. 12 No. 2,(september 2021) hal.128

Yang Maha Esa dalam Pancasila. Hal ini penting untuk memahami bagaimana perspektif dari berbagai keyakinan dapat memberikan kontribusi dalam pengertian kolektif terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, yang mendasari identitas dan kehidupan berbangsa Indonesia. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menyoroti peran agama-agama dalam mendefinisikan makna sila tersebut, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap keseluruhan konsepsi Pancasila sebagai landasan nilai bagi kehidupan beragama dan berbangsa.

Dari landasan tersebut, penulis berusaha mengurai konsep Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila dalam kaitannya dengan pemikiran Gus Dur. Pemilihan Gus Dur sebagai tokoh utama dalam kajian ini bukan tanpa alasan. Gus Dur adalah seorang tokoh pemikir yang menawarkan pendekatan epistemologis yang unik, terutama dalam konsep pluralisme, Gus Dur dikenal karena pandangannya tentang pluralisme agama, yang menekankan pentingnya mendukung keberagaman agama untuk hidup secara damai, Hendaknya ada pemisah antara agama, negara dan Pancasila.¹⁰

Sebagai seorang tokoh yang menolak ideologi Islam sebagai dasar negara. Ia menolak gagasan pembentukan negara Islam karena menurutnya. Ketika beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah berasaskan syariat Islam, Gus Dur menilai upaya ini akan menyebabkan pertentangan ancaman bagi negara yang beragam padahal sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Maka dari pada itu, penulis mencoba menggali lebih dalam bagaimana pemikiran Gus Dur memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memberikan perspektif baru dalam memahami

¹⁰ Khadziq, "Islam Budaya Lokal Memahami Realitas Agama dan Masyarakat", (Yogyakarta: Teras, 2005), hal. 31

¹¹ Kamarudin Salleh, Khoiruddin Bin Muhammad Yusuf, "Gus Dur Dan Pemikiran Liberalisem," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Vol. 1, No.2, 2014 hal. 281

Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskursus tentang hubungan antara agama, dan Pancasila yang ada di Indonesia.

B. Identikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi. Terlihat masih banyak masyarakat tidak paham konsep akan Ketuhanan bahwa kerukunan dalam beragama sangat penting.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, terdapat ketidakpahaman yang signifikan di kalangan masyarakat terkait dengan konsep Ketuhanan dalam Pancasila, yang merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat memicu potensi konflik antaragama.
2. Sikap toleransi antara umat beragama yang masih belum tertanam, meskipun Pancasila menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama, masih ada kekurangan dalam implementasi sikap toleransi di masyarakat. Sikap-sikap intoleran masih ada dan mungkin tidak cukup terakar secara kuat dalam budaya dan perilaku masyarakat yang harmonis dan inklusif.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada aspek Ketuhanan dalam Pancasila, tentunya dalam pembahasan ini akan mengulik pemikiran Gus Dur seputar Ketuhanan dan Pancasila. melakukan analisis bagaimana pandangan Gus Dur tentang konsep ini memengaruhi pemikiran dan praktiknya dalam dalam ranah beragama, berbangsa dan bernegara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Gus Dur dalam memahami sila pertama?
2. Bagaimana Gus Dur menafsirkan Ketuhanan dalam Pancasila?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal penelitian ini, untuk menganalisis konsep Ketuhanan yang terkandung dalam falsafah Pancasila yang diinterpretasikan oleh Gus Dur. Serta memahami bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan Gus dalam memahami sila pertama.
2. Untuk mengetahui tafsiran Gus Dur tentang Ketuhanan dalam Pancasila.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang konsep Ketuhanan dalam kontes Pancasila.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif atau cara pandang yang baru tentang Konsep Ketuhanan Dalam Falsafah Pancasila berdasarkan studi pemikiran Gus Dur.
 - b. Penelitian ini memperkaya kajian ilmiah tentang Pancasila dan pemikiran Gus Dur, khususnya dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menambah perspektif baru dalam studi filsafat dan ideologi negara.
 - c. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori pluralisme agama, menyoroti

pentingnya keberagaman dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini dapat diharapkan pembaca untuk menjadi masyarakat yang akan mengerti akan Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Falsafah Pancasila yang meliputi, toleransi antara umat beragama, dan sikap demokratis.
- b. Penelitian ini menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik ideologis di masyarakat.
- c. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini dapat memperkuat identitas nasional Indonesia yang berlandaskan pada kebhinekaan dan persatuan.

G. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini, peneliti menyajikan dua topik utama. Pertama, mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai seorang intelektual sekaligus pengamat masalah-masalah sosial, adalah hal yang wajar jika banyak orang tertarik meneliti kiprah Gus Dur dalam berbagai aspek.

Berikut ini disajikan tinjauan kepustakaan yang mengkaji tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Kharul Ramadhan tahun 2018 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "*Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Ditinjau Dari Fiqih Syisah*", penelitian ini fokus pada analisis implementasi Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dari perspektif fiqih syisah. Terdapat perbedaan yang muncul dalam pandangan fiqih

yang tidak secara tegas menetapkan dasar-dasar negara atau ideologi bangsa. Penelitian ini mempertanyakan signifikansi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan melakukan evaluasi terhadap pandangan fiqih siyasah terhadap konsep tersebut. Dalam konteks fiqih siyasah, konsep nilai Ketuhanan disebut sebagai Rabbaniyah, yang merujuk pada aspek Arab yang secara khusus dikaitkan dengan Allah. Konsep "*rabbani*" merujuk pada individu yang meneguhkan dan mengamalkan ajaran Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS: Al-Imran: 79).¹²

Penelitian sebelumnya fokus pada analisis implementasi Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dari perspektif fiqih siyasah (Kharul Ramadhan). Penelitian ini mempertanyakan signifikansi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila berdasarkan pandangan fiqih yang tidak secara tegas menetapkan dasar negara atau ideologi bangsa.

Sedangkan penelitian ini, mengkaji konsep Ketuhanan dalam Pancasila melalui pemikiran Gus Dur, yang dikenal dengan pendekatan pluralisme agama dan pemisahan agama dengan negara. Kesenjangan Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan fokus pada pemikiran Gus Dur yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya yang berfokus pada perspektif fiqih.

Fokus Baru Penelitian ini memusatkan kajian pada pemikiran Gus Dur, seorang tokoh penting dalam diskursus pluralisme agama di Indonesia, dan bagaimana pemikirannya dapat memberikan perspektif baru dalam memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

2. Regita Suci Cahyani menulis skripsi untuk jurusan

¹² Kharul Ramadhan, "*Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Ditinjau dari Fiqih Syisah*" Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018.

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Hamzanwadi, tahun 2023, dengan judul *"Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Pembentukan Nilai Religius Siswa Kelas di Sekolah Dasar Negeri 5 Sukarara."* Skripsi ini mengkaji bagaimana sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diterapkan dalam pengembangan nilai-nilai religius pada siswa.

Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa banyak siswa belum memiliki pemahaman yang cukup tentang sila pertama Pancasila. Implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari siswa masih minim. Skripsi ini menyoroti pentingnya penerapan sila pertama Pancasila untuk membentuk karakter religius siswa, mengontrol tingkah laku, dan meningkatkan disiplin.

Penerapan sila pertama Pancasila dalam pembentukan nilai religius siswa mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan disiplin, pengembangan sikap dan perilaku yang baik, pemahaman keagamaan, serta penghormatan terhadap keberagaman. Dengan cara ini, nilai-nilai religius siswa dapat terbentuk dengan lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan berbudaya.¹³

Penelitian Regita Suci Cahyani menyoroti implementasi sila pertama Pancasila dalam konteks pendidikan dasar, khususnya dalam pembentukan nilai religius siswa di Sekolah Dasar Negeri 5 Sukarara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diterapkan di lingkungan sekolah dan bagaimana hal tersebut membentuk karakter religius siswa. Hasil penelitian Regita menunjukkan bahwa banyak siswa belum memiliki

¹³ Regita Suci Cahyani, *"Implementasi Sila Pertama Pancasila Dalam Pembentukan Nilai Religius Siswa Kelas di Sekolah Dasar Negeri 5 Sukarara"*, (Univertas Hamzanwadi tahun 2023)

pemahaman yang cukup tentang sila pertama Pancasila dan implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari masih minim.

Penelitian mengurai konsep Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila dengan fokus pada pemikiran Gus Dur yang menekankan pentingnya pluralisme dan kebebasan beragama. Menyelidiki bagaimana pluralisme dan kebebasan beragama menurut Gus Dur dapat memberikan perspektif baru dalam memahami Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila. Gus Dur menawarkan pendekatan epistemologis yang unik terhadap konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berupaya untuk memisahkan agama, negara, dan Pancasila, dan menolak ideologi Islam sebagai dasar negara. Penelitian mencoba menggali lebih dalam bagaimana pemikiran Gus Dur dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskursus tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia.

3. Skripsi Muhlis Ardhi menulis jurusan Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014. Skripsi tersebut berjudul *"Implementasi Nilai-nilai Moral Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Etika Profesi Guru di SMP Negeri 2 Boyolali."* Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai moral dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diterapkan dalam etika profesi guru di SMP Negeri 2 Boyolali.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena negatif yang mencemari citra guru, seperti kasus pemerkosaan guru terhadap murid dan berbagai kasus lain yang meresahkan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai moral dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi guru, diharapkan para guru di SMP Negeri 2 Boyolali dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik.

Penerapan nilai-nilai ini juga diharapkan dapat mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama, serta membantu menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara sesama guru.¹⁴

Penelitian sebelumnya oleh Muhlis Ardhi menyoroiti implementasi nilai-nilai moral sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi guru di SMP Negeri 2 Boyolali. Fokusnya adalah pada aspek praktis penerapan nilai-nilai moral dalam profesi tertentu, yaitu guru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena negatif yang mencemari citra guru dan bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai moral dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam profesi guru untuk memperbaiki etika dan perilaku.

Penelitian ini mengkaji konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila melalui pemikiran Gus Dur, yang menekankan pentingnya pluralisme dan kebebasan beragama. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek praktis dan kontekstual, seperti implementasi nilai-nilai moral dalam profesi guru. Penelitian Anda mendalami aspek filosofis dan teologis dari konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan bagaimana konsep ini dapat dipahami dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.

4. Daniel Dagur dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang menerbitkan jurnal pada tahun 2021 dengan judul "*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia*" dalam Jurnal Pancasila. Jurnal ini mengeksplorasi sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, dengan fokus utama pada

¹⁴ Muhlis Ardhi, "*Implementasi Nilai-nilai Moral Sila Krtuhanan Yang Maha Esa dalam Etika Profesi Guru di SMP Negeri 2 Boyolali*" Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014.

kelompok Ahmadiyah yang dianggap minoritas dan sering mengalami intoleransi, diskriminasi, persekusi, tindakan represif, dan kekerasan dari kelompok tertentu.

Tulisan ini menggunakan tiga landasan utama. Pertama, pemikiran Soekarno tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan prinsip kebebasan beragama. Kedua, konsep teologis dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak terikat pada satu agama tertentu, tetapi sebagai konsep pemersatu bangsa. Ketiga, berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, jurnal ini mengkritisi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MUI dan SKB tiga menteri yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok Ahmadiyah.¹⁵

5. Dalam jurnal Teologi "*Cultivation*" tahun 2017, Erman S. Saragih menulis sebuah artikel berjudul "Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia." Artikel ini bertujuan untuk menggali makna teologis dari konsep "Ketuhanan" dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sikap merendahkan cara beramal dan beribadah dari penganut agama lain, yang dapat mengakibatkan pelaksanaan nilai dan kegiatan yang merugikan agama lain, berpotensi menjadi sumber konflik dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Penulis menyimpulkan tiga poin utama: Pertama, konsep Ketuhanan tidak boleh dipahami hanya dari perspektif satu agama saja dalam konteks pluralisme di Indonesia. Kedua, sifat-sifat Ketuhanan harus dihargai sebagai representasi antropomorfis dari Tuhan. Ketiga, Ketuhanan, sebagai hasil sejarah, tercermin dalam perumusan sila pertama Pancasila, dengan kesadaran akan keberagaman yang harus dijaga, dijunjung tinggi, dan dihormati dalam berbagai aspek

¹⁵ Daniel Dagur, "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia", *jurnal Pancasila*, (2021) Vol. 2 No.2

kehidupan.¹⁶

6. Jurnal karya Wira Atma Hajri dan rekan-rekannya, yang diterbitkan dalam jurnal *Wedana* tahun 2019 dengan judul "*Meluruskan Penafsiran Tentang Pancasila,*" berasal dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai penafsiran mengenai Pancasila yang muncul di masyarakat.

Latar belakang penelitian ini diambil dari situasi pada era reformasi, munculnya paham sekuler dan liberal, serta berbagai aksi atau pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, seperti Hizbut Tahrir. Penyimpangan dalam penafsiran Pancasila disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, tidak digunakannya metode tafsir yang tepat; kedua, pandangan bahwa Soekarno adalah satu-satunya perumus Pancasila; dan ketiga, adanya tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Penelitian ini menekankan pentingnya meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut untuk menjaga keselarasan penafsiran Pancasila dengan nilai-nilai yang sebenarnya.¹⁷

7. Nadila Mahilaveda Annafikarno dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menulis jurnal berjudul "*Membongkar Esensi Dasar Sila Pertama Pancasila: Internalisasi Pemikiran Islam Mohammad Arkoun dalam Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam jurnal *Journal of Islamic Law Studies*. Artikel ini mengkaji konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan menggunakan pemikiran Mohammad Arkoun.

¹⁶ Erman S. Saragih, "Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia", jurnal *Teologi "Cultivation"* (Desember 2017) Vol. 2 No. 1

¹⁷ Wira Atma Hajri, dkk, "Meluruskan Penafsiran Tentang Pancasila", jurnal *Wedana* (Oktober 2019) Vol. 2 No. 2

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dua masalah utama. Pertama, adanya perilaku yang tidak berorientasi pada konsep Ketuhanan, yang menyebabkan penyimpangan dari makna filosofis sila pertama Pancasila. Kedua, apakah model internalisasi Islam dalam konsep Ketuhanan di Indonesia sudah sesuai dengan semangat pemikiran Mohammad Arkoun.

Arkoun berpendapat bahwa pemikiran Islam yang simbolistik-formalistik perlu bertransformasi. Islam seharusnya tidak hanya difokuskan pada penciptaan konsep sebagai dasar negara. Menurutnya, negara tidak boleh menetapkan ideologi berdasarkan agama tertentu seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Kong Hu Cu, tetapi harus mengakui dan menghormati prinsip-prinsip yang dianut oleh setiap kepercayaan.¹⁸

8. Arthur Aritonang, dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, menerbitkan jurnal pada tahun 2023 berjudul "*Sejarah dan Perjalanan Sila Pertama Pancasila dari Era Orde Lama Sampai Era Reformasi*". Dalam jurnalnya, Aritonang membahas kontroversi seputar Sila Pertama Pancasila di kalangan nasionalis dan islam politik, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Pembahasan utama jurnal ini mengenai interpretasi dan konflik terkait dengan Sila Pertama, yang sering kali menjadi sumber ketegangan antar kelompok. Aritonang menelusuri sejarah perjalanan Sila Pertama dari masa Orde Lama hingga era reformasi di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana Sila Pertama Pancasila mengalami transformasi dan perubahan makna dalam konteks kehidupan beragama di

¹⁸ Nadila Mahilaveda Annafikarno, "Membongkar Esensi Dasar Sila Pertama Pancasila: Internalisasi Pemikiran Islam Mohammad Arkoun dalam Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa" *journal of Islamic Law Studies Vol.2 No.2*

Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempromosikan perdamaian dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, termasuk Sila Pertama, untuk menghadapi tantangan intoleransi agama. Dengan demikian, perbedaan agama bukan lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi bagian dari identitas bangsa yang pluralis dan beragam.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu deskriptif analitis yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas agar mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan; suatu pendekatan yang terstruktur untuk mempermudah pelaksanaan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna penting yang dipegang oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau kelompok tertentu.²¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep filosofis dan teologis yang kompleks yang dikemukakan oleh Gus Dur. Dalam hal ini, penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Gus Dur tentang Ketuhanan dalam Falsafah Pancasila secara komprehensif, termasuk penelusuran sejarah perumusan Pancasila dan perkembangan pemikiran Gus Dur, terutama terkait dengan dinamika ideologis dan agama di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data pustaka. Proses

¹⁹ Arthur Aritonang, "Sejarah dan Perjalanan Sila Pertama Pancasila dari Era Orde Lama Sampai Era Reformasi" *jurnal Davar* Vol. 4 No. 1 (2023)

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), Jil. 4, hal. 901.

²¹ Andi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, "*Metode Penelitian Kualitatif*," hal. 2.

penelitian dilakukan dengan membaca berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel untuk memperoleh data yang diperlukan, serta mencatat bahan-bahan penelitian.²² Menginterpretasikan makna dan implikasi dari pandangan Gus Dur, peneliti akan mengkaji berbagai literatur, dokumen, dan teks yang relevan dengan topik penelitian.

3. Sumber Data.

Data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber utama yang menjadi acuan penelitian ini. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumber tersebut.²³ Penulis melakukan pencarian dengan teliti, mencakup berbagai jenis materi seperti tulisan, pidato, dan buku yang telah dihasilkan oleh Gus Dur. Adapun tulisannya: *pancasila sebagai ideologi (dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Bab VII, halaman 163.*

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang bersumber dari hasil penelitian terdahulu dan telah terdokumentasi sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan topik skripsi, dokumen pendukung,

²² Kaelan, “*Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner,*” (Yogyakarta:Paramadina, 2015), hal 5.

²³ Salim dan Haidir *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis,* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 103

serta sumber daring yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji.²⁴

4. Tehnik Pengumpulan Data

Karena Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademik, serta sumber pustaka lain yang relevan dengan objek penelitian.²⁵

Mengumpulkan dan Menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pemikiran Gus Dur tentang Ketuhanan dan Pancasila. Kemudian peneliti mencoba untuk mencari sumber skunder yang relevan dalam penelitian ini. Menganalisis teks-teks untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pandangan Gus Dur mengenai pluralisme agama, hubungan agama dan negara, serta penerapan Pancasila.

I. Sistematika Penulisan

1. Bab I : Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab II : Bab ini menggali membahas biografi Gus Dur karya-karya, perjalanan karir Gus Dur di bidang politik dan agama.
3. Bab III : Menjelaskan pengertian pribumisasi Islam, Pengertian pluralisme, dan universalisme.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.225

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006) hal. 225

4. Bab IV : Menjelaskan pemikiran terhadap sila pertama Pancasila, konsep keberagaman, pluralisme agama, dan implementasi nilai ketuhanan dalam konteks bernegara
5. Bab V : penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan penelitian ini sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Kemudian beberapa saran yang akan diberikan dari penelitian sebelumnya.

BAB II

BIOGRAFI DAN KONSEP-KONSEP DASAR PEMIKIRANGUS DUR

A. Biografi

1. Latar Belakang Keilmuan

Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa dengan (Gus Dur) lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Tanggal 7 September 1940, Gus Dur merupakan anak dari pasangan K.H. Wahid Hasyim, ayahnya merupakan sosok yang punya peran penting dalam pergerakan nasional, bahkan pernah menjadi menteri agama.²⁶ Sedangkan Ibunya Nyai Sholichah merupakan putri dari pondok pesantren Jombang. Jika kita menggali lebih jauh lagi kakek dari ayahnya, K.H. Hasim Asyari, merupakan pendiri organisasi Nahdatul Ulama (NU). Sedangkan kakek dari ibu, K.H. Bisri Syamsuri, merupakan pengajar di salah satu pesantren.²⁷

Dari sini kita dapat katakan bahwa sosok Gus Dur hidup di tengah-tengah keluarga yang religius, sehingga persoalan persoalan keagamaan bagi Gus Dur bukanlah hal yang asing. Dengan kata lain, Gus Dur bukanlah orang yang awam tentang agama, karena ia memang hidup dalam keluarga yang memiliki minat tinggi terhadap agama. Melihat dari latar belakang kakek, neneknya, serta kedua orang tuanya inilah yang menjadikan Gus Dur memiliki semangat yang tinggi tentang keagamaan.

Kakek Gus Dur, K.H. Hasyim Asy'ari, adalah seorang ulama terkemuka yang mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia

²⁶ Burhani, Yaser, et al. "Pendidikan Multikulturalisme Gus Dur." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol.5. No.2 (2020) hal 29-30.

²⁷ Eha Anna Lestari "Kontribusi Konsep Etika Pendidik Perspektif K.H Hasyim Asy'ari Terhadap Kompetensi Kpribadian Guru" Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (September 2023) hal. 44

yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. K.H. Hasyim Asy'ari juga dikenal karena kontribusinya dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Ia adalah kakek dari pihak ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, yang juga merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Sementara itu, ibu Gus Dur, Nyai Sholichah, adalah cucu dari K.H. Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar di Jombang, sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikenal luas.²⁸

Gus Dur memiliki garis keturunan "darah biru" dari kedua orang tuanya, termasuk dalam golongan santri dan priyai. Dalam hierarki sosial, Gus Dur menempati strata tertinggi. Dia adalah cucu dari dua ulama terkemuka NU, yaitu Kyai Bisyri Syamsuri dan Kyai Hasyim Asy'ari, yang sangat dihormati dan dihargai dalam lingkungan NU. Penghormatan ini bukan hanya karena perannya sebagai tokoh NU tetapi juga karena kedudukannya sebagai ulama yang kharismatik.

Pada usia 13 tahun, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan pada tanggal 19 April 1953, meninggalkan Gus Dur sebagai anak yatim.²⁹ Sebelum wafat, ayahnya sering mengajak Gus Dur ke berbagai acara yang melibatkan para aktivis muda dan tokoh-tokoh penting di Jakarta, termasuk Munawir Sjadzali yang masih muda saat itu.³⁰ Gus Dur mudah bergaul dengan siapa saja dari berbagai kalangan. Ayahnya, dalam bersosialisasi, tidak pernah membedakan latar belakang orang. Bahkan, ayahnya juga menjalin hubungan

²⁸ Jonar TH Situmorang, "Gus Dur Itu Isme" *Yogyakarta: Arruz Media*, (2020), hal 3.

²⁹ Syah, Firdaus. "Tradisi Keintelektualan Pemikiran dan Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur)." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 5.2 (2022). hal.4

³⁰ Gunawan, Hasrul. *Pandangan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Dan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya Tentang Keadilan Sosial*. BS thesis, (Agustus 2024) hal. 28

baik dengan Tan Malaka, yang oleh Gus Dur dipanggil Paman Husen.³¹

Gus Dur, yang lahir dengan nama lengkap Abdurrahman Ad-Dhakhil, membawa nama yang memiliki makna mendalam dan sejarah yang kuat. Nama ini merujuk pada Abdurrahman Ad-Dhakhil, seorang pahlawan dari Dinasti Umayyah yang terkenal dengan julukan 'Sang Penakluk'.³² Abdurrahman Ad-Dhakhil adalah pendiri Emirat Córdoba di Spanyol dan dikenal atas keberaniannya serta kemampuan militernya yang luar biasa.³³ Pemberian nama ini kepada Gus Dur tidak hanya mencerminkan harapan agar ia menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh, tetapi juga menegaskan kebanggaan keluarganya akan sejarah Islam yang gemilang. Gus Dur kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati, dikenal karena upayanya dalam mempromosikan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia di Indonesia.

Semangat keagamaan ini juga tercermin dalam latar belakang pendidikan Gus Dur. Sejak usia dini, Gus Dur telah mendapatkan pendidikan yang kuat dalam bidang agama. Ia memulai pendidikannya di lingkungan pesantren, tempat yang sangat berperan dalam membentuk pemahaman dan pandangannya tentang Islam. Pendidikan formal Gus Dur dilanjutkan dengan menimba ilmu di berbagai lembaga pendidikan yang prestisius, baik di dalam maupun luar negeri.

Gus Dur awalnya menimba ilmu langsung dari kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari, selama tinggal bersama kakeknya di Jombang, Gus Dur mendapat pendidikan agama secara langsung, termasuk diajarkan membaca Al-Qur'an.³⁴

³¹ Ammar Restu Fazillah "Pemikiran Dakwah KH. Abdurrahman Wahid" Diss. UIN Ar-raniry, (Januari 2022) hal. 48

³² Jonar TH Situmorang, *Gus Dur Itu Isme*, hal 3.

³³ Biyanto, Biyanto, Syamsudin Syamsudin, and Siti Agustini. "Rihlah Peradaban Perjalanan penuh makna di Turki dan Spanyol." (Februari 2023). hal.

³⁴ Hilaluddin, Ahmad. *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)*

Pendidikan awal yang diterima Gus Dur dari kakeknya inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi pengetahuan dan spiritualitasnya. Ketika keluarganya pindah ke Jakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke Sekolah Dasar KRIS setelah sebelumnya sempat bersekolah di SD Matraman.³⁵ Perpindahan sekolah ini mencerminkan dinamika hidup keluarganya yang sering berpindah-pindah, mengikuti pergerakan orang tuanya yang juga aktif dalam dunia pendidikan dan keagamaan. Pengalaman pendidikan Gus Dur di Jakarta turut memperkaya wawasan dan pergaulannya di masa kecil.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 1945, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Tanah Abang, Jakarta.³⁶ Di SMEP, Gus Dur tidak hanya menunjukkan minat yang besar dalam studi akademis tetapi juga mulai mengembangkan kecintaannya pada budaya dan pemikiran yang lebih luas. Tanah Abang, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang dinamis, memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dan belajar langsung tentang kehidupan sosial-ekonomi di Jakarta. Pengalaman ini kelak memengaruhi pemikirannya yang terbuka dan pluralis, menjadi salah satu fondasi bagi pandangan keberagaman yang ia anut di kemudian hari.

Awalnya, minatnya terhadap buku-buku hanya sekadar hobi, tetapi lama-kelamaan ia semakin terlibat dalam membaca beragam jenis literatur, mulai dari novel petualangan hingga ensiklopedia kecil tentang dunia hewan.

Tentang Pendidikan Islam. Diss. IAIN Kudus, (Januari 2022) hal. 38

³⁵ Rosalia, Dkk. "Pendidikan Perempuan Tinjauan Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* (Desember 2023) hal.98

³⁶ Erwan Dwi Wahyunanto, Dkk. "Gus Dur Civil Society: Peran KH Abdurrahman Wahid Dalam Pemberdayaan Masyarakat" *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*. Vol. 1. (Februari 2021) hal. 4

Selain membaca, ia juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bermain bola dan menonton film, khususnya film laga dan petualangan. Sayangnya, hobinya ini sering kali membuatnya larut hingga lupa waktu. Di sekolah, ia kerap menghabiskan waktu memikirkan strategi bola atau jalan cerita film terbaru daripada fokus pada pelajaran, yang akhirnya berujung pada tidak naik kelas.³⁷

Gus Dur memiliki kegemaran membaca yang luar biasa luas. Ia melahap berbagai jenis bacaan yang menarik minatnya, mulai dari sastra Barat, seperti karya-karya Shakespeare dan Dickens, hingga sastra Rusia dengan penulis seperti Dostoevsky dan Tolstoy. Tidak hanya itu, ia juga memperdalam pemikirannya dengan menggali filsafat Yunani kuno. Buku-buku filsuf seperti Plato dan Thales menjadi bagian dari referensinya, memperkaya perspektifnya dalam memandang kehidupan, kemanusiaan, dan ketuhanan.³⁸ Minat bacanya yang luas mencakup pula literatur Islam klasik hingga karya-karya modern, mencerminkan rasa ingin tahunya yang tiada henti terhadap berbagai pandangan dunia.

Beranjak ke masa remaja, sebagian besar waktu Gus Dur dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo.³⁹ Di Yogyakarta, ia belajar di lingkungan yang penuh dinamika intelektual, di mana ia banyak berdiskusi dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh pemikir serta teman-teman sebayanya yang memiliki semangat tinggi dalam memahami agama dan budaya. Pada periode 1959 hingga 1963, Gus Dur menempuh pendidikan di Madrasah Mu'allimin Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang,

³⁷ Nur Solikhim "Gus Dur dalam Keberagaman Pendidikan Islam." *Tashwirul Afkar* 38.1 (November 2020) hal. 143

³⁸ Faida, Dkk. "Fenomena Hijrah Perspektif Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid." *An-Nida'* Vol. 45 No.2 (Desember 2021): hal. 130

³⁹ Syah, Firdaus. "Tradisi Keintelektualan Pemikiran dan Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur)." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol. 5 No.2 (2022). hal. 116

Jawa Timur.⁴⁰ Di Tegalrejo, Gus Dur menimba ilmu di bawah asuhan KH. Ali Maksum di Pesantren Krapyak. Kehidupan di pesantren ini memperkaya pandangan keagamaannya, sekaligus menanamkan kedalaman spiritual serta pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan.

Ketika berumur 20 tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Mesir (Al-Azhar).⁴¹ Akan tetapi, di Al-Azhar dia hanya menempuh kuliah selama dua tahun, karena baginya pelajaran-pelajaran yang dia ajarkan tidak lain hanyalah pengulangan terhadap apa yang telah dia pelajarnya di pesantren. Walaupun demikian Gus Dur tetap menikmati kehidupannya dengan jalan-jalan dan membaca. Bahkan, Gus Dur mulai bersentuhan dengan ide dan gagasan tentang ideologi berawal dari pengamatannya atas sosialisme Arab. Setelah di Al-Azhar Mesir, Gus Dur kemudia pindah ke Baghdad. Di universitas ini dia belajar sastra arab, filsafat, dan teori sosial.

Dengan rasa kecewa yang mendalam, Gus Dur sering kali memilih untuk tidak mengikuti kelas.⁴² Kekecewaannya ini bukan sekadar hal sepele, tetapi lebih pada ketidakpuasan karena ia dimasukkan dalam kelas yang masih pemula sama seperti sekolah awal bersama dengan mahasiswa yang masih memiliki pengetahuan bahasa Arab. Saat menjalani studi di Universitas Baghdad, Gus Dur merasa sangat puas dan menemukan hal-hal yang selaras dengan semangat modernis yang ia miliki. Di sana, ia menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana, yaitu program setara S2. Namun, sebelum ia dapat menyelesaikan ujian tesisnya, dosen

⁴⁰ Jufri “*Nilai-nilai Moderasi Prespektif Tasawuf Abdurrahman Wahid*”. BS thesis.FU. (September 2021) hal. 54

⁴¹ Dwi Kurniawan “*Konsep Pendidikan Pluralis-Humanis Dalam Bingkai Pemikiran Gus Dur*” " *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.5 No.2 (Desember 2021) hal. 239

⁴² Hilaluddin, Ahmad. *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam*. Diss. IAIN Kudus,(Maret2022) hal. 41

pembimbingnya meninggal dunia, sehingga proses penyelesaian tesis tersebut terhenti dan gelar tersebut tidak dapat ia selesaikan.⁴³

Berada di Baghdad banyak memberikan Gus Dur pengalaman hidup yang tak ia jumpai di Mesir. Di kota yang dikenal dengan "seribu satu malam" ini, Gus Dur menemukan keinginan intelektual yang sangat kuat dan berbeda dari yang ia alami sebelumnya. Di sini, ia berkesempatan menyelami lebih dalam pemikiran-pemikiran dari buku-buku besar karya orientalis Barat, dan mengasah wawasan intelektualnya melalui bacaan yang nyaris mencakup seluruh koleksi perpustakaan universitas.

Tidak hanya di dalam kampus, Gus Dur pun aktif dalam kegiatan di luar kampus. Ia sering mengunjungi makam-makam wali keramat, termasuk pusara Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyyah. Di sinilah, melalui pertemuan spiritual dan pembelajaran dari ajaran Imam Junaid al-Baghdadi salah satu tokoh tasawuf yang diikuti oleh jamaah NU Gus Dur menemukan kekayaan spiritualitas yang memperdalam keyakinannya.

Ketika Gus Dur memulai studinya di Baghdad, jadwal kesehariannya menjadi jauh lebih padat dan ketat dibandingkan saat ia masih di Kairo. Seperti biasa, ia tetap mempertahankan kebiasaan membaca, bahkan sering kali hingga menjelang pagi. Selama di Baghdad, Gus Dur bekerja di kantor Ar-Rahmadani, sebuah perusahaan kecil yang berfokus pada impor tekstil dari Eropa dan Amerika. Ia menjalankan tugasnya di sana dari pukul 11 siang hingga 2 siang dan bertahan di pekerjaan ini selama kurang lebih tiga setengah tahun. Sore harinya, ia rutin pergi ke perpustakaan universitas untuk membaca dan menambah wawasan. Karena

⁴³ Hilaluddin, Ahmad. *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam*. hal. 43

seringnya ia ke perpustakaan, akhirnya Gus Dur memutuskan untuk bekerja beberapa jam di sana agar lebih mudah mengikuti perkembangan pelajarannya. Di sana, ia juga kerap terlibat dalam diskusi-diskusi intelektual yang memperkaya pemikirannya.

Selain gemar membaca, ketika berada di Baghdad, Gus Dur juga belajar bahasa Prancis selama tiga tahun di pusat kebudayaan Prancis. Secara kebetulan, Gus Dur bertemu dengan seorang guru bahasa Prancis yang bekerja di pusat kebudayaan tersebut saat menghadiri sebuah pesta. Dalam pertemuan itu, sang guru menawarkan kesempatan untuk belajar bahasa Prancis, dan Gus Dur pun menerima tawaran tersebut. Sehari setelah pesta itu, Gus Dur resmi menjadi siswa kursus bahasa Prancis di sana.

Gus Dur menguasai beberapa bahasa, termasuk Ibrani, Yunani, Latin, dan Jerman. Kemampuan bahasa yang beragam ini memudahkan beliau untuk berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan akademik internasional. Dengan itu, Gus Dur bisa belajar dan berkeliling dari satu universitas ke universitas lain di Eropa. Beliau juga sempat menetap selama enam bulan di Belanda dan di sana mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia bagi mereka yang tinggal di Eropa. Untuk mencukupi biaya hidupnya selama merantau, dia pergi ke pelabuhan dua kali setiap bulan, bekerja sebagai pembersih kapal tanker.⁴⁴

Kegagalan dalam melanjutkan studi di Eropa membuat Gus Dur mengubah rencana. Beliau lalu mengarahkan perhatian ke Universitas McGill di Montreal, Kanada, dengan harapan bisa mempelajari pemikiran Islam secara lebih mendalam. Namun, rencana tersebut juga tidak terwujud.

⁴⁴ Saputra, Depri Fija. *Pemikiran Humanisme KH. Abdurrahman Wahid Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam: Studi Atas Karya Syaiful Arif Humanisme Gus Dur*. Diss. IAIN Ponorogo, (Juni 2022) hal.38

Akhirnya, Gus Dur memutuskan kembali ke Indonesia, terinspirasi oleh berbagai kabar menarik tentang perkembangan dunia pesantren. Gus Dur tidak berhenti belajar sampai di situ. Beliau melanjutkan pendidikannya ke Eropa, hingga akhirnya pada tahun 1971, petualangan studinya selesai dan ia pun kembali ke tanah Jawa.⁴⁵

Pada tahun 1979, Gus Dur pernah ditawari kesempatan untuk melanjutkan studi dan meraih gelar doktoral di salah satu universitas di Australia. Namun, niat baik tersebut akhirnya tidak terwujud. Kondisi tersebut berangkat dari pandangan para promotor pada masa itu yang menilai bahwa Abdurrahman Wahid tidak membutuhkan legitimasi berupa gelar akademik. Penilaian ini tercermin dari kepercayaan kalangan akademik internasional, khususnya dari Australia, yang menjadikan Gus Dur sebagai rujukan intelektual. Sejumlah disertasi doktoral bahkan diserahkan kepadanya untuk ditelaah, diberi masukan substantif, serta memperoleh dukungan akademik sebelum dipresentasikan dalam forum ilmiah.⁴⁶

2. Karya-karya

Karya tulis Gus Dur sangat melimpah, mencakup artikel, opini, dan esai. Meninggalkan begitu banyak warisan intelektual yang luas berupa karya tulis yang mendalam dan inspiratif. Tulisan-tulisannya memiliki ciri khas tersendiri bagaimana persoalan yang berat di buat cair dan halus dengan gagasan uniknya dalam menyampaikan gagasan kompleks secara sederhana.

Dalam karya-karyanya, Gus Dur dengan konsisten mengangkat isu-isu penting seperti demokrasi, pluralisme, hak-

⁴⁵ Zulfandika, Achfan Aziz, and Sepya Catur Wulandari. "Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dalam Pendidikan Moderasi Beragama." *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan* Vol5. No.1 (2024) 70.

⁴⁶ Hilaluddin, Ahmad. *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam*. Diss. IAIN Kudus, (Maret2022) hal. 45

hak minoritas, serta hubungan agama dan negara. melalui berbagai tulisan, ia berusaha mengembangkan pluralisme dan demokrasi melalui berbagai organisasi sosial, keagamaan, dan politik. Selain karya tulis, beliau memperkaya Indonesia dengan pengembangan pluralisme dan demokrasi di berbagai lembaga.

Berikut daftar karya tulis dalam bentuk buku.

- a. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi, Wahid Institute, 2006.
- b. Prisma Pemikiran Gus Dur, LKiS, Jogjakarta, 1999.
- c. Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural, 1998.
- d. Membangun Demokrasi, Rosda, Bandung, 1999.
- e. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kompas, Jakarta, 1999.
- f. Islam, Negara, dan Demokrasi, Erlangga, Jakarta, 1999.
- g. Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Grasindo, Jakarta, 1999.
- h. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Desantara, Jakarta, 2001.
- i. Bunga Rampai Pesantren, CV. Dharma, tanpa tahun, tanpa tempat.
- j. Tuhan Tidak Perlu Dibela, LKiS, Jogjakarta, 1999.
- k. Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren, LKiS, Jogjakarta, 2001.
- l. Gila Gus Dur, LKiS, Jogjakarta, 2000.
- m. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, LKiS, Jogjakarta, 1997.
- n. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, LKiS Jogjakarta, 2002
- o. Islam Tanpa Kekerasan, LKiS, Jogjakarta, 1998.
- p. Gus Dur Bertutur, 2005.
- q. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan

Transformasi Kebudayaan (2007).⁴⁷

3. Kiprah Politik

Setelah menyelesaikan studi di luar negeri, Abdurrahman Wahid memutuskan kembali ke Jombang pada tahun 1971. Kepulangannya menandai keterlibatannya dalam kepengurusan Pesantren Tebuireng. Pada 11 September 1971, ia melangsungkan pernikahan dengan Sinta Nuriyah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai empat orang putri, yaitu Alissa Qotrunnada Munawara, Syarifah Zanuba Absah, Anita Chayatunnufus, dan Inayah Wulandari.⁴⁸

Pada periode 1974–1980, Gus Dur dipercaya oleh pamannya, H.M. Yusuf Hasim, untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng. Bersamaan dengan peran tersebut, ia mulai aktif menekuni dunia kepenulisan dengan berkontribusi pada berbagai media, seperti surat kabar, majalah, dan jurnal. Dalam karya-karyanya, Gus Dur menampilkan gaya penulisan khas yang memadukan bahasa sehari-hari dan unsur humor untuk membahas isu-isu serius. Selain itu, pada masa ini pula ia mulai terlibat dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama serta menjalankan aktivitas mengajar di sejumlah lembaga pendidikan lainnya.⁴⁹

Pada tahun 1977, ia dipercaya mengemban jabatan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin yang membidangi aspek praktis, serta menjabat sebagai sekretaris di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng. Pada periode tersebut, aktivitas kepenulisannya semakin intensif, dan melalui karya-karya tulisnya inilah perhatian publik mulai tertuju kepadanya.⁵⁰

Pada awal tahun 1980 Gus Dur diangkat menjadi Sekertaris Syiriah PBNU. Ia terlibat beberapa diskusi

⁴⁷ Muhamamad Rifai “Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009,” (Jogjakarta: Garasi, 2014) hal. 51

⁴⁸ Syamsul Hadi, “KH. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa, Bapak Pluralisme” (Jombang 2010) hal. 17

⁴⁹ Ali Yahya, “Gus Dur di Mata Adik-adiknya,” (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010) hal. 21

⁵⁰ A. Mubarak dan Fathurahman Karyadi, “Biografi Singkat”, *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, Hal.10

berbagai persoalan mengenai agama, sosial dan politik. Saat yang bersamaan pemerintah masih enggan bersikap oposisi dari organisasi terbesar ini. Akibatnya, NU tidak begitu baik hubungannya dengan pemerintah. Hingga pada akhirnya Gus Dur mampu membuat penerimaan asas tunggal dari kalangan NU. Sejak saat itu hubungan antara NU dan Pemerintah sudah mulai membaik.⁵¹

Nahdatul Ulama (NU) menggantikan ayahnya, tentunya dalam kepemimpinannya di NU terjadi dialektika antara pendiri Republik, para Kiyai, para Agamawan dan para budayawan.⁵² Salah satu menjadi ciri khasnya Gus Dur selalu mengedepankan demokrasi dan memperjuangkan perubahan politik yang lebih baik.

Di tengah kesibukannya mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur, yang awal kehadirannya di Indonesia penuh dengan semangat pembaruan, mulai memperluas jaringan sosialnya, Gus Dur mulai memperluas jaringannya melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama beberapa tokoh. Dari sini, gagasan-gagasan progresif dan langkah-langkah inovatif Gus Dur tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menciptakan gelombang pengaruh yang besar.

Keberanian tokoh ini untuk melawan arus kebiasaan yang lazim di masyarakat, terutama ketika tindakan tersebut bertentangan dengan pemikirannya, meskipun mendapat tantangan besar, menunjukkan komitmen mendalam terhadap ajaran Islam dan di nilai-nilai kebangsaan menjadikan ia sebagai tokoh yang populer sekaligus dimusuhi dan dicaci hingga saat ini.⁵³

Peran Abdurrahman Wahid dalam dinamika politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat dikatakan sangat

⁵¹ Al-Zastrauw Ng, "*Gus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan pertanyaan Gus Dur*," (Jakarta: Erlangga, 1999) Hal.29

⁵² Egi Septiana "*Catatan Gus Dur*" (Bandung: Ebook. No.05.10.05) hal.19

⁵³ Al-Zastrauw Ng, "*Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?*," hal. 31

menentukan. Figur Gus Dur yang memiliki kharisma kuat baik sebagai ulama, intelektual, maupun negarawan menjadi modal simbolik sekaligus politis yang memperluas basis dukungan dan meningkatkan daya tarik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tengah masyarakat. Tanpa keberadaan sosok tersebut, perkembangan PKB kemungkinan tidak akan berlangsung secepat dan sekuat yang terjadi saat ini. Sejak masa awal pembentukannya, Gus Dur menempati posisi sentral dalam merumuskan orientasi, arah kebijakan, serta strategi politik PKB, sehingga pengaruhnya secara konsisten mewarnai langkah dan posisi partai tersebut dalam arena politik nasional.⁵⁴

Peran Gus Dur dalam perpolitikan di PKB begitu besar, karena dengan ketokohan Gus Dur ia mampu memandu arah langkah PKB. Sepertinya jika tanpa adanya bayang Gus Dur dalam visi, misi, dan perilaku politik PKB secara dominan mencerminkan pemikirannya. Gus Dur sangat mempengaruhi gerak langkah PKB dipentas percaturan politik sejak partai berdiri.⁵⁵

Awalnya didirikan PKB pada bulan Juli 1998, mayoritas kader dan simpatisan PKB memiliki harapan besar agar berharap Gus Dur menjadi presiden. Harapan tersebut semakin nyata ketika pada tanggal 7 februari 1999, Ketua Umum PKB secara resmi mengumumkan bahwa partai tersebut mendukung pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden Republik Indonesia. Pengumuman ini menegaskan posisi PKB sebagai partai politik yang berkomitmen membawa nilai-nilai NU ke dalam tatanan pemerintah nasional. Gus Dur menjadi ketua dewan syuro pertama partai

⁵⁴ Ali Yahya, "*Gus Dur di Mata Adik-adiknya*," (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010) hal. 22

⁵⁵Faisal Ismail. "*NU Gusdurisme dan Politik Kiai*," (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999) hal. 144

tersebut.⁵⁶

Pada tanggal 20 Oktober 1999, di tengah suasana pemilihan presiden yang berlangsung di gedung DPR-MPR, Gus Dur terpilih secara resmi terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dengan perolehan suara 373. Momen ini juga menandai awal dari era kepemimpinan yang lebih inklusif dengan semangat persatuan dalam keberagaman.

Reformasi awal yang digagas oleh Gus Dur adalah. Salah satu tindakan pertamanya adalah membubarkan Departemen Penerangan, sebuah institusi yang selama era Soeharto menjadi alat utama untuk mengontrol dan memanipulasi informasi publik demi kepentingan rezim. Dengan pembubaran Departemen Sosial yang korup.

Gus Dur juga memberikan otonomi istimewa, memungkinkan masyarakat Aceh untuk menjalankan hukum Islam sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal mereka, langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Aceh. Pada bulan Desember, Gus Dur melakukan kunjungan ke Jayapura yang kemudian diikuti dengan kebijakan perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas dan martabat masyarakat setempat. Atas peran dan perhatiannya tersebut, Gus Dur hingga kini dikenang dan dihormati oleh masyarakat Papua dengan sebutan “Bapak Orang Papua”.⁵⁷

Selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden, banyak langkah strategis untuk merombak kondisi bangsa dan memperkenalkan ruang kebebasan yang luar biasa luas. Kebijakan-kebijakannya sering kali menjadi sorotan dan

⁵⁶ Greg Barton, “*Biografi Gus Dur The Authorized Biografi of Abdurrahman Wahid*,” (Yogyakarta : LKIS, 2002) hal. 324

⁵⁷ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi’ “Biografi Singkat”, A.MY. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Shabat*, hal. 21

memicu kontroversi di berbagai kalangan, baik pihak yang mendukung maupun yang menentangnya sama-sama kerap mengalami kesulitan dalam memahami dasar serta maksud dari tindakan-tindakan yang ia lakukan.⁵⁸ Pada akhir November 2000, sebanyak 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan sebuah petisi politik yang berisi tuntutan agar Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari jabatannya.

Pada 1 Februari 2001, DPR mengadakan suatu pertemuan dalam rangka untuk mengeluarka nota terhadap Gus Dur. Isi dari nota tersebut adalah usulan agar diadakan sidang khusus MPR yang memungkinkan proses pemakzulan presiden. Hingga akhirnya pada 23 juli 2001, MPR resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan megawati Soekarno putri sebagai penggantinya.⁵⁹

Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kebenaran dan terus bersuara lantang. Meskipun sejak awal masa kepresidenannya ia telah mengalami stroke akibat diabetes, Gus Dur selalu menyampaikan kepada siapapun yang menemuinya bahwa kondisinya baik-baik saja.

Pada pemilihan presiden tahun 2004, PKB mencalonkan Gus Dur kembali sebagai presiden. Namun, pencalonan tersebut terhalang oleh aturan KPU yang mengatur tentang kesehatan calon presiden. Pada agustus 2005 Gus Dur bergabung sebagai salah satu tokoh utama dalam Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu, sebuah koalisi politik yang aktif mengkritik kebijakan pemerintahan di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik utama yang mereka ditujukan pada kebijakan pencabutan subsidi BBM, yang memicu

⁵⁸ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-adiknya*, hal. 23

⁵⁹ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, hal. 23

kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.

Pada 23 Desember 2009, Gus Dur mengunjungi shabatnya, KH. Mustafah Bisri, di Rembang, Jawa Tengah. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Jombang untuk berziarah ke makam kakeknya, KH. Wahab Hasbullah namun, karena kelelahan, kondisi fisik Gus Dur menurun drastis sehingga harus dirawat di RSUD Suwadana Jombang.

Setelah kondisinya sedikit membaik, ia disarankan untuk melanjutkan perawatan di RSUD Surabaya, tetapi rencana tersebut dibatalkan dan Gus Dur langsung dirujuk ke RSUD Dr. Cipto Mangunkusum, Jakarta. Pada Rabu, 30 Desember 2009, kondisi Gus Dur memburuk dinyatakan kritis pada pukul 11.00 WIB akibat komplikasi penyakit ginjal dan diabetes yang dideritanya. Akhirnya, pada pukul 18.45 WIB, Gus Dur menghembuskan napas terakhirnya.

Wafatnya tokoh besar Indonesia ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga mengejutkan dunia internasional. Mantan Presiden RI keempat tersebut meninggalkan banyak kenangan mendalam bagi rekan-rekan politik, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri.⁶⁰

4. Kiprah Agama

Menurut Gus Dur, esensi utama dari sebuah agama terletak pada bagaimana manusia memaknai keberadaannya di dunia dan berperan dalam mengolah serta mengatur kehidupan demi kebaikan. Meskipun ekspresi keagamaan seiringkali menunjuk pada agama Islam secara sosiologis. Dalam pancangan ini Gus Dur tidak menekankan aspek sosiologis ajaran Islam, melainkan pendekatan filosofis. Ia menegaskan bahwa keberan sejati hanya dapat dicapai ketika semangat dan hakikat hukum dijakikan prioritas utama dibandingkan sekedar

⁶⁰ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor) *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, hal.24

memahami yang tersurat dalam aturan hukum.⁶¹

Gus Dur memulai perjalanan kariernya dengan menimba ilmu di pesantren. Pada tahun 1959, ia belajar di Pesantren Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur. Saat itu, ia sudah menunjukkan minat besar untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Cita-citanya untuk menjadi seorang pengajar membawa Gus Dur pada kesempatan mengajar di sebuah madrasah modern yang berada di bawah naungan pesantren tersebut.

Tidak hanya menjadi guru, Gus Dur juga diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di madrasah tersebut. Dalam perannya ini, Gus Dur memberikan kontribusi besar dengan mengajar dan membimbing para santri hingga tahun 1963, yang merupakan awal dari kiprahnya dalam dunia pendidikan.⁶²

Dengan bekal pendidikan yang mendalam dan pemahaman luas terhadap ilmu pengetahuan, pada era 1970-an, Gus Dur mulai aktif terlibat dalam kalangan intelektual Indonesia. Saat itu, ia bergabung dengan LSM LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial), yang memainkan peran signifikan dalam memajukan diskusi intelektual di Indonesia. Salah satu inisiatif penting lembaga ini adalah penerbitan Jurnal Prisma, yang pada masa itu dikenal sebagai jurnal ilmu sosial utama di Tanah Air. Gus Dur menjadi salah satu penulis tetap di jurnal tersebut, menulis tentang topik-topik yang relevan dengan perubahan sosial dan pemikiran progresif. Yang menarik bagi Gus Dur, LP3ES memiliki ketertarikan kuat terhadap dunia pesantren dan berupaya menghubungkan nilai-nilai pesantren dengan

⁶¹ Muhammad Rifai, "Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009" (*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT*), hal. 98

⁶²Solikhin, Nur. "Gus Dur dalam Keberagaman Pendidikan Islam." *Tashwirul Afkar* Vol.38. No.1 (Juni 2020) hal. 144

dinamika masyarakat modern, sehingga memungkinkan pemikiran Islam yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Setiap dua minggu sekali, Gus Dur menyempatkan diri berkunjung ke kantor Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta. Dalam kunjungan ini, ia biasanya bekerja selama dua hingga empat hari, membawa wawasan mendalam tentang dunia pesantren dan Islam tradisional.⁶³

B. Konsep-konsep Dasar

1. Islam

Islam yang merupakan ajaran yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari wahyu dan akal, Islam terus berkembang secara dinamis untuk merespons tantangan zaman. Ekspresi keagamaan dalam penyebutannya memang sering menunjuk pada Islam, tetapi dalam pandangan Gus Dur tidak hanya menunjuk ajaran Islam secara sosiologis, tetapi filosofis.

Dalam pandangan Gus Dur, ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang kuat, termasuk nilai toleransi dan kehidupan sosial yang harmonis. Prinsip-prinsip tersebut justru menjadi landasan bagi umat Islam untuk bersikap terbuka terhadap realitas kemajemukan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pluralitas tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kondisi sosial yang perlu disikapi secara positif dan konstruktif.⁶⁴

Hal tersebut dapat dijadikan rujukan dalam cara berpikir dan bertindak Gus Dur. Ia meyakini bahwa setiap agama pada dasarnya menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai landasan utama untuk membangun hubungan dialogis yang kondusif di tengah realitas akan pluralis.

⁶³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* hal. 114-115

⁶⁴ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 34

Dalam upaya Gus Dur mengurai ketegangan akibat tarik-menarik antara agama dan kebudayaan manusia, Gus Dur menawarkan solusi dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, alih-alih terjebak dalam perbatasan tafsir keagamaan yang bersifat diperdebatkan

Gagasan tersebut dapat dipahami melalui tulisan Gus Dur berjudul “*Islam Kaset dengan Kebisingan*” (1999: 37–38), di mana ia menyampaikan kritik secara implisit terhadap praktik keagamaan tertentu yang, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk dakwah, berpotensi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Praktik seperti pemutaran bacaan Al-Qur’an dan tarhim pada waktu tengah malam, saat sebagian besar masyarakat sedang beristirahat, dipersoalkan karena dapat bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kenyamanan dan hak sesama.

Pada dasarnya, setiap agama menempatkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip fundamental. Oleh karena itu, apabila praktik keagamaan justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka cara pengamalan ajaran agama tersebut perlu ditinjau kembali secara kritis.⁶⁵

Jika dipahami melalui perspektif humanisme, kedekatan Gus Dur dengan kelompok di luar Islam dapat dilihat sebagai konsekuensi dari orientasi kemanusiaannya. Keterlibatannya dalam Fordem serta sikap terbukanya dalam menghadiri berbagai undangan, termasuk yang berasal dari pemeluk agama lain, mencerminkan komitmennya terhadap relasi sosial yang inklusif dan lintas batas keagamaan.⁶⁶

Dalam kerangka pemikiran keagamaan yang dibangun Gus Dur melalui perspektif Islam politik, muncul gagasan-gagasan yang menempatkan Islam dalam dialog dengan konteks sosial dan budaya lokal. Sebagaimana dicatat oleh Djameludin dan Idi Subandy, salah satu gagasan penting yang ia kembangkan adalah wacana *pribumisasi Islam*, yang

⁶⁵ Listiyono Santoso, *Teologi Politik*, hal. 108.

⁶⁶ Dedy Djameludin Malik & Idi Subandy Ibrahim, “Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaludin Rahmat,” (Bandung: Zaman Mulia, 1998), hal. 92.

meskipun dimaksudkan sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Islam, justru menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri.

Gagasan utama teks tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur menolak penggunaan cara-cara kekerasan atau pendekatan kelompok laskar dalam menyelesaikan konflik sosial. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum bersifat universal, sehingga tidak dapat dimonopoli atau diklaim sebagai milik eksklusif oleh satu agama tertentu.

Gagasan utama yang disampaikan Gus Dur menegaskan bahwa pelepasan unsur-unsur formal dalam keberagamaan tidak perlu dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi Islam. Menurutnya, meskipun nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan demokrasi bersifat universal dan menjadi bagian dari nilai kemanusiaan secara umum, Islam tetap memiliki karakter, orientasi, dan tujuan khas yang membedakannya dari konsep-konsep kemanusiaan lainnya.⁶⁷

Pada titik inilah, pemikiran keagamaan Gus Dur memiliki kemiripan dengan gagasan K.H. Muhammad Misbach, tokoh pembaharu asal Solo yang dikenal aktif pada awal abad ke-20, khususnya sekitar tahun 1925. Misbach dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap umat Islam yang hanya berfokus pada simbol dan ritual formal atau yang disebutnya sebagai "Islam lamisan". Sebagai bentuk perlawanan terhadap formalisme tersebut, Misbach bahkan menyandingkan prinsip-prinsip Islam dengan ide-ide komunisme, bukan dalam kerangka ideologis semata, tetapi karena keduanya menurutnya memiliki titik temu yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada kaum tertindas nilai-nilai yang juga sangat dijunjung tinggi dalam pandangan Gus Dur.

Ia mengajak semua pihak meninggalkan perbedaan-perbedaan yang bersifat formalitas atau prosedural demi mencapai esensi ajaran agama, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa

⁶⁷ Abdurrahman Wahid, 2001:132.

memandang latar belakang agama. Pendekatan ini menjadikan Gus Dur tidak hanya sebagai tokoh Muslim, tetapi juga sebagai simbol pluralisme dan toleransi yang hidup dalam praksis sosial-politik Indonesia.

2. Negara

Menurut Gus Dur, “Antara agama dan negara sendiri memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Dalam hal ini yang tidak sama katakanlah dalam melaksanakan wawasan Islam, maka ini menjadi tanggung jawab di pundak Islam, tanpa perlu membebani negara. Negara meminta untuk mengayomi hal-hal yang sifatnya kepentingan bersama seluruh warga negara, tanpa membedakan usul-usul suku, agama, bahasa, dan warna kulitnya.”

Dalam hal mendasar permasalahan yang pertama kali muncul adalah mengenai hubungan antara agama dan negara. Isu ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi, hingga Gus Dur menyebutnya sebagai “titik sentral perhatian” gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.⁶⁸ Namun, ia tidak membahas kaitan agama (Islam) dan negara dalam perspektif akademik dan sistematis, melainkan lebih bersifat reflektif sebagaimana dalam tulisan-tulisannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gagasan dari sejumlah pihak yang menghendaki agar Islam dijadikan sebagai ideologi negara untuk menggantikan Pancasila. Menurut pandangan penulis telah terjadi penyempitan pandangan.

Persoalan mengenai relasi antara agama dan negara, atau dalam istilah Abdurrahman Wahid tentang ada atau tidaknya konsep kenegaraan dalam Islam, menghadapi sejumlah hambatan konseptual. Hambatan tersebut terutama bersumber dari pandangan yang menganggap Al-Qur’an sebagai teks yang sepenuhnya memberikan penjelasan menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem kenegaraan,⁶⁹

⁶⁸ Abdurrahman Wahid, “Islam: Punyakah konsep kenegaraan?”, Tempo, 26 Maret 1983. Esai ini dihimpun kembali dalam Tuhan Tak Perlu Dibela, Yogyakarta: LkiS, 1999, hal. 15-18.

⁶⁹ Secara argumentatif, Harun Nasution meng-counter anggapan bahwa

Gagasan tersebut melahirkan pandangan yang menempatkan Islam tidak semata sebagai sistem kepercayaan keagamaan, melainkan sekaligus sebagai entitas politik kenegaraan. Dalam kerangka ini, agama dan negara dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana tercermin dalam pandangan yang menyatakan bahwa Islam mencakup dimensi agama, kehidupan duniawi, dan kekuasaan politik, seperti yang dikemukakan oleh Nazih Ayubi.⁷⁰

Kendala kedua terletak pada sejarah kekuasaan politik dalam Islam sejak tahun 632 M, yang kerap mengaitkan dirinya dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan Nabi, sekaligus mengklaim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesulitan karena melahirkan anggapan bahwa aliran pemikiran di luar arus utama dianggap "keliru". Padahal, setiap bentuk pemikiran dan praktik politik seharusnya ditempatkan dalam ruang perdebatan, bukan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak.

Di luar arus pemikiran tersebut, berkembang pula perspektif lain yang secara tegas mengambil posisi berlawanan. Pandangan ini diwakili oleh sejumlah intelektual Muslim yang menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami agama dan relasinya dengan realitas sosial, di antaranya Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Sa'id al-Asymawi, Ali Abd al-Raziq, Nurcholish Madjid, serta Abdurrahman Wahid.⁷¹ Diantara argumen yang

al-Qur'an memuat segala persoalan; tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial-kemasyarakatan, soal-soal industri, pertanian dan sebagainya. Lebih lengkap baca Harun Nasution, "Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah", Studi Islamika, Juli 1983, juga Harun Nasution A. Dahlan Ranuwihardjo dan syafi'i Ma'arif, "Hubungan Islam dan Negara", Dialog, Nomor 19, Tahun IX, September 1985, hal. 5-15

⁷⁰ Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London and New York : Poutledge, 1991, hal. 63-64

⁷¹ Lebih lanjut lihat Dale F. Eickelman & James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 66-71. Untuk penelitian tentang teori politik Islam, dari zaman klasik, pertengahan, modern dan kontemporer baca Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997, hal. 75-170

di ungkapkan oleh Qomaruddin Khan bahwa ada landasan yang kokoh mengenai pencampuran adukan agama dan politik. Khan menulis:

“Klaim bahwa Islam merupakan sebuah paduan agama dan politik yang harmonis adalah sebuah slogan modern, yang jejaknya tidak dapat ditemukan dalam sejarah masa lalu Islam. Istilah “Negara Islam“ tidak pernah digunakan di dalam teori atau praktik ilmu politik muslim sebelum abad ke-20. Juga seandainya tiga puluh tahun pertama Islam dikecualikan, perilaku negara-negara muslim didalam sejarah hampir tidak dapat di bedakan dari perilaku negara-negara lainnya dalam sejarah dunia.”⁷²

Meskipun demikian, asumsi tentang “ceseropapisme” atau pandangan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan tetap bertahan dalam kajian Islam. Padahal, konsep “din wa daulah” sebenarnya tidak terlalu relevan, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, adanya kekhasan dalam politik Islam. Kenyataannya, agama memang menjadi pusat kehidupan politik masyarakat di berbagai belahan dunia, sehingga hal tersebut bukanlah monopoli umat Islam semata. Kedua, justru asumsi ini secara tidak langsung memperkuat pandangan orientalis bahwa wacana politik Islam memang “berbeda” karena dianggap kurang rasional. Dalam tradisi akademik orientalis, selalu ada perbedaan penekanan antara “Timur” dan “Barat” yang sering kali menghasilkan stereotip tertentu. Akibatnya, umat Islam kerap dicitrakan sebagai kelompok yang emosional, sulit dikendalikan, tidak kompromis, dan susah diajak bernegosiasi. Ketiga, pandangan tersebut semakin menegaskan anggapan bahwa politik adalah sebuah jaringan yang tidak berujung dan bercampur baur, karena adanya hubungan timbal balik yang alami antara agama dan politik.

Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai relasi antara Islam dan negara berangkat dari dinamika diskursus politik Islam yang telah berkembang luas. Dalam kerangka tersebut, ia memetakan pandangan yang ada ke dalam dua

⁷² Dikutip dari Dale F. Eikelman & James Piscatori, *Ekspresi Politik*, op. Cit, hal. 67-68

kecenderungan utama, yakni pendekatan minimalis dan pendekatan optimalis.⁷³ Jika mengacu pada tipologi tersebut, Abdurrahman Wahid dapat digolongkan ke dalam kelompok “minimalis”. Maksudnya, ia meyakini bahwa Islam memiliki peran sebagai sumber inspirasi, yakni mendorong lahirnya peraturan dan legislasi negara yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, tanpa harus bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Terlepas dari alasan yang melatarbelakanginya, sikap Abdurrahman Wahid terlihat cukup “janggal”, bahkan dapat dikatakan menunjukkan kekeliruan dalam berpikir. Hal ini disebabkan karena selama ini ia dikenal sering mengesampingkan aspek formalitas, namun justru pada kesempatan ini ia menuntut adanya landasan formal.

Dengan demikian, tampak bahwa ia menerapkan standar ganda dalam menilai wacana mengenai ada atau tidaknya konsep negara.

Untuk menguatkan pandangan baha Islam tidak memiliki konsep negara, Gus Dur menyinggung tradisi Islam pada masa awal. Menurutnya, Nabi Muhammad diangkat langsung oleh Tuhan melalui wahyu sebagai pemimpin umat. Namun, setelah beliau wafat, muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak memimpin. Pada akhirnya, Abu Bakar dipilih melalui bai’at sebagai pemimpin.

Sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Selanjutnya, Khalifah Umar membentuk sebuah majelis ahli al-hal wa al-‘aqd yang bertugas menentukan penggantinya. Dalam susunan tersebut, Umar memasukkan putranya, Abdullah bin Umar, sebagai salah satu dari tujuh anggota, meskipun tanpa hak suara. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib justru mengangkat dirinya sendirinya sebagai pimpinan.⁷⁴

⁷³ Abdurrahman Wahid, “*Islam: Punyakah konsep kenegaraan?*”, hal.17

⁷⁴ Baca berturut-turut Abdurrahman Wahid, “*Islam Mengutamakan Politik sebagai Moralitas*”, Arrisalah, Edisi XXIX/TH.VIII/1996, hlm. 53 ; juga idem, Tabayun Gus Dur, Yogyakarta: LkiS, 1997, hlm. 235-236; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1990, hlm. 21-28; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan*

Menurut pemikiran Abdurrahman Wahid, tidak ditemukannya ketentuan eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadis terkait tata cara pergantian kekuasaan mengindikasikan bahwa kesepakatan tentang bentuk negara tidak didasarkan pada dalil naqli. Penentuan tersebut lebih berangkat dari kebutuhan sosial yang berkembang dan selalu terkait dengan kondisi historis, ruang, serta waktu tertentu. Dengan demikian, negara dipahami sebagai konstruksi yang lahir dari kepentingan yang bersifat temporal, sehingga tidak layak ditempatkan dalam posisi yang sakral. Perspektif ini pula yang menjelaskan mengapa dalam ajaran Islam pembahasan mengenai bentuk negara maupun mekanisme alih kekuasaan tidak menempati porsi yang dominan.⁷⁵

3. Ketuhanan

Pembahasan mengenai ketuhanan dalam konteks keislaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, dan politik yang berkembang di Indonesia. Di tengah keberagaman agama dan keyakinan, konsep ketuhanan harus ditempatkan bukan hanya sebagai dasar teologis, tetapi juga sebagai prinsip kemanusiaan yang menjaga harmoni sosial. Pada ranah inilah pemikiran Gus Dur menjadi relevan dan penting untuk dikaji. Melalui gagasannya yang inklusif, Gus Dur menghadirkan pemahaman ketuhanan yang menegaskan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penerimaan terhadap keragaman sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Pemikiran tersebut memberi kontribusi besar bagi kehidupan beragama di Indonesia yang plural, sehingga menarik untuk dianalisis lebih jauh dalam perspektif falsafah Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Paramadina, 1998, hlm. 183 ; juga Musthafa Abd Rahman, "Gus Dur, Agama dan Negara", Kompas, 25 Oktober 1999.

⁷⁵ Abdurrahman wahid, " Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam ", Aula, edisi Desember 1986, hal.33

Gus Dur menekankan bahwa nilai ketuhanan harus terwujud dalam kehidupan nyata melalui dialog antara aspek spiritual dan kebutuhan material manusia. Hidup, menurutnya, adalah proses menghubungkan kesadaran Ilahi dengan tindakan, yang harus dijalankan dengan kesabaran agar tidak berujung pada kekerasan dan pelanggaran martabat manusia. Karena itu, ia menilai pentingnya keseimbangan antara ajaran agama yang bersifat normatif dan kebebasan berpikir dalam menghadapi perubahan zaman.⁷⁶

Agama mengajarkan nilai kebersamaan dan kepedulian, namun realitas sosial kita justru menunjukkan meningkatnya sikap individualistis. Alih-alih tercipta solidaritas antarkelompok, yang tampak adalah semakin lebarnya jarak antara kalangan kaya dan miskin sebagai bukti nyata dari ketimpangan tersebut.⁷⁷

Hubungan agama dengan kebudayaan mencerminkan pertemuan antara aspek yang tetap dan aspek yang berubah, sehingga sering memunculkan ketegangan. Gus Dur menjelaskan bahwa Islam dan budaya memiliki otonomi masing-masing, meskipun terdapat bagian yang saling bersinggungan. Agama yang bersumber dari wahyu bersifat normatif sehingga cenderung tetap, sementara budaya merupakan hasil kreativitas manusia yang berkembang sesuai perubahan zaman. Meski demikian, perbedaan keduanya tidak menutup kemungkinan munculnya ekspresi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.⁷⁸

Terkait dengan konsep ketuhanan, dalam karyanya

⁷⁶ Damrizal, Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid, Jurnal *Manthiq*, 126

⁷⁷ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hal. 29

⁷⁸ Syarif Arif, *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, hal. 101-102

yang berjudul *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Gus Dur menyatakan bahwa “Allah itu Maha Besar, Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesaran-Nya. Ia Maha Besar karena Ia ada, apapun yang diperbuat orang atas diri-Nya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujud-Nya dan atas kekuasaan-Nya”⁷⁹

Dalam karyanya *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Gus Dur mengutip pandangan Al-Hujwiri yang menegaskan bahwa keberadaan Allah tidak bergantung pada rumusan pemikiran manusia. Karena itu, tidak sepatasnya manusia meratapi kesulitan yang datang dari-Nya atau merasa perlu membela Tuhan ketika konsep ketuhanan dipersoalkan. Yang patut dikhawatirkan bukan hakikat Allah, melainkan bagaimana manusia dapat keliru memahami-Nya sehingga menimbulkan persoalan dalam kehidupan.⁸⁰

Gus Dur dalam karyanya *Tuhan Tidak Perlu Dibela* menyinggung pemahaman tentang Tuhan melalui pengalaman estetik seorang penyair cilik, yang merasakan kehadiran Ilahi dalam bentuk keindahan, sebagaimana diungkapkan oleh Dewi Marhaini Nasution: “*Sungguh aku tak tahu // bahwa Tuhan itu // adalah Kau // Yang setiap saat kujumpai // lewat permainan kami tadi*”⁸¹

Muhammad Sofyan memaknai kehadiran Tuhan sebagai pengalaman yang tercermin dalam relasi antarmanusia, meskipun dengan pemahaman yang berbeda.

“*Bila Kau hendak memanggil // panggil aku sendiri // bila Kau hendak memberi // jangan aku sendiri*”.

Menurut Gus Dur, pemahaman tersebut hanya dapat terwujud ketika manusia mampu membangun dialog batin

⁷⁹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hal. 67

⁸⁰ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hal. 67

⁸¹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hal.103

dan kedekatan dengan Tuhan. Relasi yang akrab ini diyakini akan menghadirkan pertolongan dan kekuatan ilahi bagi manusia dalam menghadapi persoalan yang muncul dari tindakannya sendiri.

Gus Dur berpandangan bahwa takdir sepenuhnya merupakan kewenangan Tuhan sebagai otoritas tertinggi, namun hal itu tidak meniadakan ikhtiar manusia. Ketetapan Tuhan dipahami sebagai mekanisme psikologis agar manusia mampu menerima hasil akhir dengan lapang dada setelah melakukan usaha secara maksimal.⁸²

Gus Dur meyakini bahwa kewenangan memberi ganjaran maupun hukuman sepenuhnya berada pada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, kendali atas segala peristiwa berada dalam kekuasaan-Nya, yang menegaskan Allah sebagai sumber otoritas dan kebenaran yang tunggal dan tertinggi.⁸³

Gus Dur mengkritik sikap yang memaksakan pandangan sebagai satu-satunya kebenaran. Menurutnya, pengalaman spiritual yang bersifat personal dapat dibagikan tanpa paksaan, karena kebenarannya hanya dapat diuji melalui realitas kehidupan. Ia menegaskan bahwa kebenaran bersifat relatif, sementara kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Atas dasar itu, perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang wajar; seorang Muslim dengan keimanannya, demikian pula umat Kristen dan Yahudi dengan keyakinannya masing-masing. Perbedaan tersebut tidak mengubah hakikat Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang absolut dan transenden.⁸⁴

⁸² Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hal. 93-94.

⁸³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: Democracy Project: 2011), hal. 7.

⁸⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, hal. 66-139

Perbedaan pandangan dalam diskusi merupakan konsekuensi alami dari keragaman pola pikir manusia dan cara mereka menyelesaikan persoalan. Idealnya, perbedaan tersebut dikelola secara bijaksana melalui dialog untuk mencapai kesepahaman. Namun, realitasnya sering kali perbedaan justru memicu sikap permusuhan dan tindakan yang dilandasi kebencian terhadap pihak yang tidak sependapat.⁸⁵

⁸⁵ Eko Makmud Hidayat Masruri, Nilai-Nilai Pendidikan Pluralisme Dalam Buku “*Tuhan Tidak Perlu Dibela*” Karya Abdurrahman Wahid, hal.75.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP FALSAFAH PANCASILA

MENURUT GUS DUR

C. Prinsip-prinsip Pemikiran Gus Dur

1. Pribumisasi Islam

Pribumisasi Islam menjadi dasar pemikiran Gus Dur dalam melihat Islam sebagai etika sosial dan kenegaraan. Dalam pemikirannya Gus Dur mengkritisi upaya formalisasi dan universalisasi Islam yang cenderung menyeragamkan praktik keberagaman dengan menjadikannya sistem menyeluruh dalam kehidupan sosial. Upaya menjadikan budaya Islam yang dianggap ideal sebagai rujukan utama untuk menggantikan budaya lokal justru melahirkan bentuk penyeragaman keagamaan. Proses ini berdampak pada terpinggirkannya keragaman budaya Nusantara karena ekspresi lokal dinilai tidak sejalan dengan standar budaya Islam yang dibakukan.⁸⁶ Pandangan ini ahistoris, sebab dalam proses Islamisasi Islam justru berperan sebagai penghubung budaya lokal yang melahirkan universalitas tanpa meninggalkan akar sejarahnya.

Gus Dur bertanya: bagaimana melestarikan akar budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini?⁸⁷ Formalisme agama yang mengedepankan simbol Arab melahirkan Arabisasi total, mencabut umat Islam dari akar budayanya serta mengabaikan kebutuhan riil, seperti penerimaan negara

⁸⁶ Menarik ketika Gus Dur memberikan contoh ketidaksesuaian antara budaya Nusantara dengan Arab dari aspek “tata ruang”. Arsitektur tropis di Indonesia sejak semula menolak arsitektur Islam dari Timur-Tengah, seperti penyediaan halaman luas di balik dinding tembok yang tinggi, dengan lorong sempit sebagai jalan penghubung dengan dunia luar. Pola ini didiktekan karena masyarakat Arab menganut pola pergaulan tertutup, hanya untuk keluarga besar. Satu pola yang berbeda dengan pergaulan masyarakat Nusantara yang terbuka. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Kebudayaan Islam di Indonesia*, makalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta, pada diskusi budaya “Pikiran Rakyat” di Aula PT Granesia Bandung, 5 Februari 1985

⁸⁷ Abdurrahman Wahid, *Salahkah Jika Dipribumikan? Kolom Tempo*, 1983

bangsa dan pemikiran filsafati. Sebagai respons, Gus Dur menggagas pribumisasi Islam guna mengontekstualisasikan nilai universal Islam sesuai kebutuhan lokal, sehingga hadir dalam budaya, hukum, dan politik masyarakat.

Pribumisasi Islam merupakan konsep Gus Dur yang paling populer.⁸⁸ Konsep ini berangkat dari kebutuhan menggambarkan realitas keberagaman umat yang membentuk suatu identitas keislaman semenjak Islam datang di Nusantara.

Islam di Indonesia telah menyatu dengan budaya Nusantara dan persoalan kontemporer, dengan tiga bentuk utama: akomodasi adat oleh syariat, penerapan nash pada masalah modern, dan ekspresi Islam dalam budaya lokal. Dalam ranah kenegaraan, Gus Dur menekankan penerapan nash secara etis, bukan legalistik, sehingga nilai Islam dapat dihidupkan dalam negara bangsa modern tanpa harus diformalkan. Menurutnya, konstitusi modern yang manusiawi selaras dengan etika sosial Islam.

Dari sini, Islam berfungsi membangun masyarakat etis dan berkeadilan, sementara negara berperan sebagai instrumen kelembagaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

⁸⁸ Pada era kini, diskursus pribumisasi Islam ini Gus Dur lontarkan melalui pembedaannya atas dua pendekatan dakwah dalam Islam: budaya dan institusional. Gus Dur memilih yang pertama, melalui berbagai produk budaya semisal halal bi halal, terbangun, tahlilan, tabarrukan, ngaji posoan, hingga penerimaan NU atas wilayah Hindia-Belanda sebagai dar al-Islam sejak 1935. Dalam hal ini Gus Dur menyebutnya “pengislaman terbatas”, seperti yang dilakukan Sultan Agung melalui islamisasi tahun Saka, serta penggunaan fiqh dalam hukum pernikahan. Pendekatan budaya ini tidak mempermasalahkan institusi politik makronya. Selama umat muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah yang sudah membudaya tersebut, maka Islam tidak perlu di institusikan. Pada titik ini Gus Dur kemudian mencetuskan pentingnya studi Islam kawasan agar corak kedaerahan Islam di masih pelosok budaya bisa terekam. Secara tipologis, ia membagi kawasan Islam kedalam enam area; (1) Islam Afrika Hitam meliputi Maroko, Kenya, dsb (2) Islam Afrika Utara dan Arab (3) Islam masyarakat Turki, Persia, dan Afghanistan (4) Islam Asia Selatan seperti Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, dan Srilanka (5) Islam Asia Tenggara (6) minoritas Islam di negara-negara industri maju. Pengajian Romadlonan bersama Gus Dur di Pesantren Ciganjur, dengan kitab Qathr al-Nada wa Ball al-Shada karya Abu Muhammad Abdullah bin Hisyam al-Anshori, Ramadhan 1424 H/September 2003.

Dengan demikian, orientasi utama pemikiran Gus Dur tentang kenegaraan Islam tidak terletak pada formalisasi simbol dan struktur negara, melainkan pada perwujudan etika sosial yang bersumber dari ajaran Islam. Konsep negara yang berlandaskan nilai-nilai etis Islam, sebagaimana tercermin dalam gagasan negara kesejahteraan, hanya dapat direalisasikan apabila Islam mampu berakar dalam konteks sosial-budaya masyarakat. Tanpa proses pribumisasi tersebut, wacana kenegaraan Islam akan terus terjebak pada dorongan formalisasi agama dalam sistem kenegaraan, alih-alih menginternalisasikan nilai-nilai substansialnya.⁸⁹

Gagasan utama teks tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kebangsaan saat ini berkembang ke dalam dua arus pemikiran. Satu arus menekankan pentingnya penerapan ajaran Islam secara formal dalam berbagai ekspresi budaya nasional. Sementara itu, arus lainnya cenderung menghindari pendekatan formalistik, dengan alasan bahwa dinamika kebudayaan merupakan proses jangka panjang yang kompleks dan tidak mudah dikendalikan atau diprediksi hasilnya.⁹⁰

Gagasan pribumisasi Islam menurut Gus Dur merupakan upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar selaras dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi normatifnya. Islam dipandang sebagai pedoman hidup untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai sistem alternatif yang meniadakan budaya setempat. Bagi Gus Dur, agama dan budaya saling mengisi meski tetap berbeda. Pribumisasi bertujuan memperkuat akar budaya sekaligus membentuk masyarakat yang taat beragama.

Dalam praktiknya, Gus Dur membedakan antara ekspresi normatif (seperti doa dalam salat yang tak bisa diganti) dan ekspresi kultural (seperti salam atau sapaan yang dapat diadaptasi). Ia menolak arabisasi budaya yang memaksakan istilah dan simbol Arab menggantikan tradisi lokal, seperti

⁸⁹ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2013), hal. 178.

⁹⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), hal. 203.

mengubah ulang tahun menjadi *milad* atau masjid beratap genteng menjadi berkubah. Menurutnya, identitas keislaman tidak ditentukan oleh penggunaan simbol Arab, tetapi oleh nilai ajaran yang dijalankan. Karena itu, pribumisasi Islam dimaksudkan untuk menjadikan budaya lokal sebagai wadah ekspresi keberagaman, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ushul fiqh dan qawaid fiqh.

Gus Dur menegaskan bahwa Islam harus tetap menjaga keasliannya, seperti penggunaan bahasa Arab dalam Al-Qur'an dan shalat, sementara terjemahan hanya berfungsi sebagai penjelas. Namun, ia juga mendorong pribumisasi Islam sebagai bentuk kontekstualisasi ajaran tanpa menghilangkan identitas keislaman. Hal ini tampak dari upayanya mempertahankan istilah dan simbol budaya lokal, seperti pesantren, sebutan kiai, hingga penggunaan batik atau peci hitam. Pribumisasi ini bukanlah penolakan terhadap puritanisme, melainkan usaha memadukan ajaran Islam dengan budaya bangsa secara kreatif dan kontekstual.

2. Pluralisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme dipahami sebagai pandangan yang mengakui keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Demokrasi juga mencerminkan sebuah pandangan hidup yang menekankan prinsip kesetaraan, baik dalam hak maupun kewajiban, serta menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.⁹¹

Pandangan Abdurrahman Wahid mengenai pluralisme dan demokrasi telah tampak sejak masa kepemimpinannya di PBNU pada dekade 1980-an, ketika kebijakan pemerintah cenderung bersifat sektarian. Berbagai gagasan dan perjuangannya diarahkan untuk meneguhkan nilai-nilai pluralisme serta demokrasi di Indonesia. Konsistensinya terhadap prinsip demokrasi tercermin, antara lain, dalam

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hal. 883, 889, dan 897.

wawancara pada masa Orde Baru berjudul “*Negeri Ini Kaya dengan Calon Presiden*”, yang menunjukkan perhatian mendalam Gus Dur terhadap pentingnya demokrasi sejak awal.

Menurut Gus Dur, pluralisme tidak dapat dilepaskan dari persoalan agama, sebab agama sering dijadikan legitimasi politik oleh kelompok mayoritas untuk mendominasi kaum minoritas. Sikap pluralisme Gus Dur tercermin dalam keberpihakannya terhadap kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa dan non-Muslim⁹², dengan memberikan mereka kesempatan yang setara dalam ruang-ruang strategis kenegaraan. Ia bahkan berani membela tokoh kontroversial, seperti Arswendo Atmowiloto pemimpin tabloid *Monitor* yang sempat mendapat kecaman keras karena menempatkan Nabi Muhammad saw pada urutan ke-11 dalam daftar tokoh Indonesia dan dunia. Hal ini menunjukkan konsistensi Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi.

Ketika muncul desakan dari umat Islam agar izin terbit (SIUPP) sebuah tabloid dicabut, Gus Dur menolak langkah tersebut. Menurutnya, penyelesaian yang tepat adalah melalui jalur pengadilan, karena hal itu lebih menjamin keadilan. Ia menegaskan dengan mencontohkan pengalaman Soekarno pada masa kolonial yang meskipun dijatuhi hukuman, tetap mampu melahirkan pledoi *Indonesia Menggugat*⁹³, yang kemudian menjadi landasan moral perjuangan bangsa Indonesia.

Gus Dur menekankan pentingnya penghormatan terhadap otoritas pengadilan serta menolak tindakan main hakim sendiri. Ia melihat bahwa upaya sebagian kelompok untuk menghukum Arswendo dalam kasus tabloid *Monitor* lebih didorong oleh sentimen keagamaan, mengingat Arswendo seorang non-Muslim. Lebih jauh, Gus Dur menegaskan bahwa umat Islam perlu meningkatkan kedewasaan beragama dengan mengedepankan sikap

⁹² Hamsina, “*Kontribusi Pemikiran Kebangsaan Abdurrahman Wahid Terhadap NKRI*” Tesis, Juli 2021 hal. 70

⁹³ Hamsina, “*Kontribusi Pemikiran Kebangsaan Abdurrahman Wahid Terhadap NKRI*” Tesis, Juli 2021 hal, 71

konstruktif, memperluas wawasan, membina akhlak, serta menciptakan keseimbangan antara aspek emosional dan rasional.

Adapun mengenai buku Salman Rushdie yang menuai kontroversi, Gus Dur justru terlihat memberikan pembelaan. Saat umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan reaksi emosional terhadap terbitnya karya *Ayat-Ayat Setan* tulisan Salman Rushdie, Gus Dur menyampaikan bahwa;

“Saya tahu bukunya Salman itu menghina, main-main dan saya betul marah membaca buku itu. Tapi, bagaimana pun juga hak mengatakan pendapat itu, sesuatu yang sangat berharga. Ini yang juga oleh Islam. Lho, kok tahu-tahu kita tanpa mengadilinya dengan tepat, langsung hukuman mati “in absentia”. Itu kan emosional.”⁹⁴

Gus Dur menegaskan sikapnya melalui perlawanan terhadap anggapan bahwa tindakan keras merepresentasikan ajaran Islam. Baginya, Islam justru mengandung nilai kemanusiaan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kelompok lain. Kecurigaan sebagian pihak terhadap perkembangan Islam yang dianggap mengarah pada sektarianisme muncul karena adanya kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri sekaligus menyalahkan pihak lain. Isu-isu seperti dikotomi pribumi dan non-pribumi maupun wacana Kristenisasi sesungguhnya lahir dari semangat sektarian, sementara kehidupan plural hanya dapat dipelihara melalui prinsip-prinsip demokrasi.

Sikap toleransi dan keterbukaan Gus Dur tercermin dari kemampuannya membangun relasi dengan berbagai kalangan, mulai dari kelompok nasionalis, tokoh agama, hingga kaum sosialis. Kekuatan iman yang ia miliki membuatnya tidak merasa khawatir ataupun mencurigai niat buruk pihak lain. Hal tersebut terlihat, misalnya, ketika ia menghadiri perayaan Natal di Balai Sidang Senayan mengatakan bahwa;

⁹⁴ Hamsina, “Kontribusi Pemikiran Kebangsaan Abdurrahman Wahid Terhadap NKRI” Tesis, Juli 2021 hal. 71

“Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya. Tetapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama Umat manusia. Sejak kecil itu saya rasakan, walaupun saya tinggal di lingkungan Pondok Pesantren, hidup di kalangan keluarga Kyai. Tetapi tidak pernah sedetik pun saya merasa berbeda dengan yang lain.” Komitmen memandang seseorang dari sisi kemanusiaannya yang sering diperlihatkan.

Gus Dur merumuskan pandangannya dengan merujuk pada QS. al-Isra’/17:70 yang menegaskan kemuliaan manusia, serta mengacu pada gagasan KH. Ahmad Shiddiq—sesama pimpinan PBNU hasil Mukhtar Situbondo 1983—tentang *Ukhuwah Insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan) dan *Ukhuwah Wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan). Atas dasar itu, ia menekankan bahwa setiap manusia, terlepas dari agama yang dianut, memiliki martabat yang harus dihormati dan dimuliakan.

3. Universalisme Islam

Sebagai salah satu intelektual terkemuka Indonesia, gagasan Gus Dur memiliki kekayaan pemikiran yang luas dan terus menjadi objek kajian, penelitian, serta pengembangan di berbagai bidang. Beragam karya mengenai dirinya telah diterbitkan, namun pesona pemikirannya tetap bertahan hingga kini. Hal ini menunjukkan relevansi pemikirannya untuk terus direkonstruksi, terutama dalam upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia bukan sekadar fakta sosial, melainkan potensi besar yang menentukan arah kehidupan berbangsa. Tanpa pengelolaan yang arif, keragaman berisiko melahirkan konflik. Sebaliknya, jika dikelola secara cerdas dan jujur akan menjadi kekayaan kultural yang memperkuat persatuan dan memperkaya peradaban nasional. Kekayaan kultural harus dibela dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan lapang dada.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan*

Pembelaan dan pelestarian terhadap kekayaan kultural merupakan tuntutan yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Dinamika kehidupan sosial membuat kekayaan tersebut tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Dalam proses interaksi dan dialektika dengan keragaman lain, perbedaan tidak jarang memunculkan ketegangan. Jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan itu dapat berpotensi berkembang menjadi konflik yang dapat mengancam harmoni sosial. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa dinamika hubungan keagamaan tidak selalu berlangsung secara damai, karena dalam berbagai periode muncul tindakan kekerasan, baik yang terjadi di antara sesama pemeluk Islam maupun dalam relasinya dengan kelompok non-Muslim.⁹⁶

Maka dari itu, upaya merumuskan strategi dan tindakan nyata untuk mencegah, atau setidaknya meminimalisir, konflik sosial merupakan agenda penting yang harus dijalankan secara berkesinambungan. Hal ini semakin relevan bagi Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Namun, besarnya populasi Muslim tidak serta merta menjamin nilai-nilai Islam hadir dalam praktik kehidupan sosial. Di sinilah pemikiran Gus Dur menemukan relevansinya.

Bagi Gus Dur, Islam bukan hanya ajaran teologis, tetapi juga pedoman etika sosial yang menekankan penghormatan terhadap keragaman. Melalui gagasannya tentang pluralisme dan keadilan sosial, Gus Dur menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam justru menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan bebas dari konflik. Secara kritis Gus Dur menyatakan bahwa Indonesia yang umat Islamnya terbanyak di dunia ternyata juga negara yang banyak melakukan pelanggaran terhadap

Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan bekerja sama dengan Ma'arif Institute, 2009), hal. 246.

⁹⁶ Abd. A'la, —The Genealogy Of Muslim Radicalism In Indonesia, A Study of the Roots and Characteristics of the Padri Movementl, (Journal of Indonesian Islam, Volume 02, Number 02, Desember 2008), hal. 268.

Hak-hak Asasi Manusia (HAM).⁹⁷

Keadaban sosial hanya dapat dibangun apabila manusia memiliki pandangan positif dan konstruktif terhadap sesama. Cara pandang semacam ini mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dasar kemanusiaan dan justru menumbuhkan sikap saling menghormati. Dalam konteks pemikiran Gus Dur, hal ini berakar pada universalisme Islam yang dipahaminya sebagai nilai-nilai fundamental syariat. Universalisme tersebut bersifat universal karena tujuan akhirnya adalah menjaga martabat manusia. Gagasan tersebut menegaskan bahwa nilai kemanusiaan diwujudkan melalui jaminan terhadap lima hak fundamental manusia, yakni hak untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, hak atas kepemilikan, serta hak untuk membangun dan menjaga kehidupan keluarga.⁹⁸

Gus Dur menegaskan bahwa universalisme Islam tidak boleh dipahami sekadar sebagai slogan kosong. Sebaliknya, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islam telah terbukti sepanjang sejarah mampu melahirkan kontribusi nyata bagi peradaban, khususnya dalam menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Dengan demikian, universalisme Islam memiliki legitimasi historis sekaligus relevansi praktis dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis. Gus Dur menegaskan bahwa, “Universalisme tercermin pada ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian terhadap unsur-unsur kemanusiaan yang diimbangi dengan kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri”.⁹⁹

Menurut Gus Dur, sebagaimana dikutip Syaiful Arif, universalisme Islam tercermin melalui berbagai manifestasi, terutama dalam ajaran-ajarannya. Ajaran tersebut mencakup

⁹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. xxiii.

⁹⁸ As'ad Said Ali, —Pengantar Ahli: Konstruksi Pemikiran Gus Dur, dalam Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), hal.13.

⁹⁹ Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 1-2.

aspek hukum (fiqh), keimanan (tauhid), etika (akhlak), hingga sikap hidup, yang seluruhnya berorientasi pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya sistem keyakinan dan aturan formal, tetapi juga sebuah kerangka universal yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur memperlihatkan bahwa Islam memiliki relevansi besar dalam membangun peradaban yang inklusif dan humanis, sehingga mampu merespons tantangan keragaman masyarakat Indonesia secara konstruktif.

Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di hadapan hukum, perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, pemenuhan hak-hak kelompok lemah, serta pembatasan kekuasaan, sesungguhnya menegaskan adanya komitmen moral terhadap keadilan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga landasan fundamental untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadaban. Dengan demikian, keberadaannya menjadi argumen kuat bahwa kehidupan berbangsa harus diarahkan pada perlindungan martabat manusia dan keseimbangan kekuasaan.

Salah satu bukti nyata universalisme Islam terwujud melalui lima jaminan dasar yang ditetapkan agama ini bagi setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hadir untuk kepentingan pemeluknya, tetapi juga untuk menjamin tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa Islam membawa nilai universal yang relevan bagi seluruh umat manusia, bukan semata-mata bagi komunitas internalnya. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah) lama.¹⁰⁰

Universalisme Islam menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hadir untuk meniadakan budaya lokal, melainkan untuk memberikan ruang dialog antara nilai-nilai universal dengan

¹⁰⁰ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), hal. 283.

tradisi partikular yang telah hidup di masyarakat. Dengan demikian, Islam menunjukkan fleksibilitasnya sebagai agama yang bersifat inklusif dan adaptif, bukan eksklusif serta menutup diri dari keragaman. Gus Dur mengartikulasikan pandangan ini melalui gagasan *pribumisasi Islam*, yakni proses penyesuaian ajaran Islam dengan konteks budaya Indonesia tanpa mengurangi substansi keislamannya. Konsep ini menjadi argumentasi kuat bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal sekaligus memperkaya ekspresi keberagaman umat.

Menurut Gus Dur, *pribumisasi Islam* harus dipahami secara benar agar tidak disalahartikan sebagai upaya mereduksi ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari dinamika sejarah Islam, baik di tempat asalnya maupun ketika hadir di Indonesia. Melalui analogi “sungai besar” yang menerima aliran baru, Gus Dur menjelaskan bahwa perjumpaan Islam dengan budaya lokal tidak mengubah substansi ajaran Islam, melainkan hanya memperkaya bentuk dan manifestasi kehidupannya. Dengan demikian, *pribumisasi Islam* menjadi bukti bahwa Islam mampu berdialog dengan realitas sosial-budaya tanpa kehilangan esensi universalnya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah mempercepat pengembangan pemahaman terhadap nash agar tidak hanya berhenti pada penafsiran tekstual, melainkan berkembang secara sistematis, komprehensif, dan berlandaskan argumentasi yang kokoh. Dengan demikian, nash mampu menjawab persoalan kontemporer sekaligus menjaga relevansi ajaran Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Apabila tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka yang dimaksud dengan *pribumisasi Islam* adalah suatu pendekatan pemahaman terhadap nash keagamaan yang diolah secara kontekstual dengan realitas sosial, budaya, dan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat Indonesia.¹⁰¹

Substansi *pribumisasi Islam* terletak pada cara Gus Dur memaknai hubungan agama dan budaya. Dalam situasi global

¹⁰¹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 124.

yang diwarnai menguatnya gerakan fundamentalis yang cenderung menolak budaya lokal, gagasan ini menjadi relevan karena menawarkan paradigma Islam yang inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, *pribumisasi Islam* bukan sekadar wacana kultural, melainkan argumentasi filosofis bahwa Islam mampu berdialog dengan tradisi tanpa kehilangan esensinya.

Bagi Gus Dur, agama dan budaya harus dipahami sebagai dua ranah yang berbeda namun saling melengkapi. Agama bersumber dari wahyu sehingga bersifat normatif dan permanen, sedangkan budaya merupakan produk kreativitas manusia yang dinamis dan selalu berubah. Perbedaan karakter ini menunjukkan independensi keduanya, namun justru membuka ruang dialog agar agama tidak terlepas dari realitas sosial, dan budaya tetap memiliki arah moral yang berpijak pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun memiliki fokus kajian yang berbeda, ruang lingkup yang digarap oleh keduanya pada dasarnya saling beririsan. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk memisahkan keduanya secara tegas dalam praktik kehidupan nyata.¹⁰²

B. Pemikiran Falsafah Pancasila Gus Dur

1. Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa

Pemahaman terhadap konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari hakikat Pancasila itu sendiri sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi sumber inspirasi, pedoman moral, serta arah pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi langkah awal yang penting untuk memahami konteks dan kedalaman makna sila pertama, sehingga penafsiran terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilakukan secara utuh dalam bingkai Indonesiaan.

¹⁰² Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Koekoesan, 2001), hal. 117.

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kedatangan berbagai pihak ke wilayah ini berlangsung secara damai, sebagai bagian dari proses besar yang meliputi aktivitas perdagangan, pendidikan, serta interaksi kebudayaan dan sebagainya. Melalui rangkaian proses yang berlangsung secara damai, bangsa Indonesia pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan luhur untuk menetapkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai prinsip fundamental yang menjiwai falsafah hidup bangsa, ideologi negara, serta menjadi dasar utama dalam sistem hukum nasional.¹⁰³

Melalui perjalanan sejarah yang panjang, bangsa Indonesia mengalami proses saling berinteraksi antara nilai-nilai spiritual lokal dan ajaran agama yang datang kemudian. Dinamika ini, yang ditandai oleh keterbukaan timbal balik antara agama-agama dan kepercayaan yang telah hidup di Nusantara, pada akhirnya mengantarkan Indonesia pada satu titik krusial dalam sejarahnya, yakni perumusan Pancasila sebagai dasar bersama kehidupan berbangsa.

Agama dapat menampilkan wujud yang beragam ketika dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Agama dapat dipahami sebagai realitas yang memiliki dua dimensi utama. Secara spiritual, agama berfungsi sebagai jalan bagi manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan yang terwujud dalam praktik-praktik ibadah. Sementara itu, dalam dimensi kultural, agama berperan sebagai medium penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sekaligus menjadi wadah ekspresi estetika yang paling autentik. Sedangkan dari sisi politik, agama berfungsi sebagai tatanan yang adil dan bermakna.¹⁰⁴ Kerangka idealistik agama tersebut perlu dilestarikan demi masa depan bangsa dan negara, dengan cara meneguhkan peran agama dalam kehidupan nasional melalui Pancasila sebagai pedoman hidup bersama.

¹⁰³ K.H. Abdurrahman Wahid, *Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan*, <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, di akses tanggal 8 Oktober.

¹⁰⁴ K.H. Abdurrahman Wahid, *Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan*.

Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur seluruh elemen bangsa. Namun, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan dan fungsi yang nyata, ia kemudian ditegaskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, orientasi pemikiran dan sikap masyarakat seharusnya berakar pada Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang utuh, bukan dipahami atau diterapkan secara parsial berdasarkan sila-sila tertentu saja. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi dasar berpikir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta pengaturan hubungan antar lembaga dan individu dalam negara. Oleh karena itu, negara perlu menjaga keberadaan dan konsistensi Pancasila agar kesinambungan pemikiran kenegaraan tetap terpelihara.¹⁰⁵

Sebagai ideologi nasional sekaligus dasar filosofis negara, Pancasila kerap dipahami memiliki titik temu dengan sejumlah dimensi kehidupan beragama serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan oleh sifat agama dan kepercayaan ketuhanan yang bersifat universal, melampaui batas-batas kebangsaan dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, upaya untuk membatasi nilai-nilai keagamaan semata-mata dalam kerangka keindonesiaan menghadapi tantangan konseptual yang tidak sederhana.¹⁰⁶

Hal tersebut terlihat jelas dalam peran Pancasila yang menegaskan pentingnya sikap terbuka dan toleran dalam kehidupan antarumat beragama serta para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama dan kepercayaan memiliki pandangan eksklusif masing-

¹⁰⁵ K.H. Abdurrahman Wahid, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* ” <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, di akses tanggal 8 Oktober 2025

¹⁰⁶ K.H. Abdurrahman Wahid, “*Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*”

masing, namun juga mengandung nilai universal yang menempatkan semua agama dan kepercayaan dalam posisi yang setara.¹⁰⁷

Dengan demikian, pandangan Pancasila mengenai kebersamaan antaragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki karakter tersendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan perspektif masing-masing agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain.

2. Penafsiran Masing-masing Sila dalam Pancasila

Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila merupakan fondasi filosofis yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur memandang bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan esensi dasarnya. Penafsirannya menempatkan Pancasila sebagai prinsip yang hidup melalui penghormatan terhadap kemanusiaan, kebebasan beragama, kesetaraan, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan interpretasi Gus Dur terhadap setiap sila dalam Pancasila sebagai kontribusi pemikiran bagi pembangunan peradaban bangsa yang inklusif dan demokratis.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pandangan Gus Dur, Pancasila dapat ditempatkan pada beberapa posisi. Pertama, sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai acuan berpikir yang menjadi landasan penyusunan undang-undang serta berbagai produk hukum lainnya. Ia menegaskan bahwa pola pikir nasional ditentukan oleh falsafah tersebut, sehingga keberadaannya wajib dijaga secara berkelanjutan oleh negara.¹⁰⁸

Kedua, sebagai falsafah dan ideologi negara,

¹⁰⁷ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

¹⁰⁸ Nur Khalik Ridwan, “Gus Dur dan Pembelaan Terhadap Pancasila” *Nu Online*, Tanah Air, <https://nu.or.id/pustaka/gus-dur-dan-pembelaannya-terhadap-Pancasila-wP7te> di akses tanggal 8 Oktober 2025

Pancasila memiliki area tumpang tindih dengan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Menurut Gus Dur, agama dan kepercayaan mengandung unsur universal sekaligus eksklusif, sehingga tidak bisa sepenuhnya dibatasi oleh konteks keindonesiaan. Sementara itu, Pancasila mewakili identitas Indonesia dan menekankan toleransi serta kelapangan dalam hubungan antarumat beragama. Namun, pemahaman kebersamaan dalam Pancasila tidak identik dengan pemahaman dalam masing-masing agama atau kepercayaan.¹⁰⁹

Gus Dur menegaskan pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia dan menunjukkan komitmennya untuk membela nilai-nilainya, dalam pernyataan tegasnya bahwa, “Tanpa Pancasila negara akan bubar. Ia menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang abadi dan gagasan yang harus dijaga serta diperjuangkan, bahkan dengan nyawanya, meski menghadapi ancaman dari militer, umat Islam, atau penyalahgunaan keduanya.”¹¹⁰

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dalam Islam, keadilan merupakan nilai fundamental yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, Salah satunya perintah dari Allah SWT yang berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman tegakkan keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan kalian, walau ada kerugian (sebagian dari kalangan) kalian sendiri” (QS An-Nisa:135). Pemahaman ini menjadi dasar pemikiran Gus Dur tentang keadilan.¹¹¹

Gus Dur menekankan bahwa manusia wajib menunaikan janji, tugas, dan amanahnya, melindungi yang lemah atau menderita, menunjukkan solidaritas nyata, serta bersikap jujur. Menurutnya, keadilan tidak hanya berlaku pada tingkat individu, tetapi harus

¹⁰⁹ Nur Khalik Ridwan, “Gus Dur dan Pembelaan Terhadap Pancasila”

¹¹⁰ Nur Khalik Ridwan, “*Gus Dur dan Negara Pancasila*” Tanah Air, Yogyakarta, 1 September 2010, hal. 43

¹¹¹ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 92

dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini berlaku bagi semua orang, tanpa memandang agama, dengan menghormati kebebasan masing-masing dalam menjalankan keyakinan. Pandangan ini selaras dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menekankan perlakuan adil dan penghormatan terhadap hak serta martabat seluruh manusia.¹¹²

Menurut Gus Dur, keadilan harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok lemah seperti yatim piatu dan kaum miskin, agar harta tidak hanya terkonsentrasi di kalangan kaya. Oleh karena itu, kepentingan dan kesejahteraan rakyat menjadi fokus dalam pemerintahan, sesuai prinsip fikih: “*tasharrof al-Imam ‘ala al-ro’iyah manuthun bi al-mashlahah*”, yang menekankan bahwa kebijakan pemimpin harus langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.¹¹³

3. Persatuan Indonesia

Sebagai seorang pemimpin agama, Gus Dur giat melakukan dialog antar agama dan antar budaya. Ia memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang tinggi, dan penting untuk membangun pemahaman yang saling menghormati. Gus Dur berusaha membuka pintu dialog untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat persatuan nasional.

Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda suku, bangsa, dan jenis kelamin agar saling mengenal (QS al-Hujurat [49]:13). Dengan demikian, perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, melainkan peluang untuk dialog dan kerjasama demi kesejahteraan bersama. Prinsip ini mencerminkan kewajiban menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial melalui interaksi yang harmonis, di mana fokusnya bukan pada

¹¹² Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 93

¹¹³ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 93

keseragaman aqidah, tetapi pada pencapaian manfaat materi dan kemaslahatan masyarakat.¹¹⁴

Hubungannya dengan sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” terlihat pada penekanan bahwa keberagaman keyakinan, suku, dan bangsa seharusnya menjadi sarana membangun persatuan dan kerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama, bukan menjadi sumber perpecahan.¹¹⁵ Meskipun tiap agama memiliki keyakinan yang berbeda misalnya Muslim tetap berpegang pada tauhid, Kristen pada kepercayaan Yesus sebagai Anak Tuhan, dan Yahudi pada status umat pilihan perbedaan ini tidak menghalangi kerja sama dalam hal kesejahteraan dan urusan sosial. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”, yang menekankan pentingnya bekerja sama dan membangun persatuan meski terdapat perbedaan keyakinan, sehingga kepentingan bersama dapat tercapai tanpa mengabaikan identitas masing-masing.¹¹⁶

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak menyampaikan pendapat dan menentukan jalan hidupnya; keadilan menuntut akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh elemen masyarakat; sementara musyawarah merupakan mekanisme etis untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan tersebut secara damai dan beradab.¹¹⁷

Gagasan demokratisasi Gus Dur telah diperkenalkan ke publik sebelum ia menjabat sebagai presiden. Ia

¹¹⁴ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 134

¹¹⁵ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 135

¹¹⁶ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 135

¹¹⁷ Abdurrahman Wahid, “*Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi*,” dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM, 1993), hal. 90.

melihat demokrasi di Indonesia sebagai proses dan budaya yang berkelanjutan,¹¹⁸ bukan sekadar sistem kelembagaan seperti pada era Orde Baru Gus Dur menjelaskan;

“Ya kan mereka sudah ngomong sudah ada demokrasi dengan mengatakan sudah ada lembaganya. Ada MPR, ada DPR, BPK. Ya, semacam itulah. Namun saya sendiri beranggapan, demokrasi itu harus utuh, tidak hanya lembaga tetapi prilaku orangnya juga harus demokratis. Nyatanya prilaku kita nggak demokratis”¹¹⁹

Bagi Gus Dur, demokrasi bukan sekadar keberadaan lembaga formal seperti DPR atau MPR, tetapi merupakan budaya yang harus hidup dalam sikap, perilaku, dan konstruksi sosial. Karena itu, perjuangan demokrasi harus bersifat sistemik, kultural, dan berkelanjutan dilakukan melalui pembentukan sistem yang adil, penguatan budaya toleran, serta pengawalan terus-menerus terhadap kekuasaan agar tidak menyimpang menjadi otoritarian.

Sikapnya yang kerap dianggap kontroversial mencerminkan konsistensinya mempertahankan esensi demokrasi: perbedaan adalah hal wajar, kebebasan berpendapat harus dijamin, dan kedaulatan hukum harus berdiri di atas kedaulatan kekuasaan. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur sejalan dengan sila ke-4 karena menempatkan demokrasi sebagai praktik permusyawaratan yang menjunjung kebebasan, menegakkan keadilan, dan menghormati keragaman sebagai fondasi kehidupan bernegara.

¹¹⁸ Nurcholish Madjid, “*Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia: Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya Sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional*,” dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hal. 203.

¹¹⁹ Wawancara Wartawan Forum dengan Gus Dur dengan judul “*Negeri Ini Kaya Dengan Calon Presiden*” dalam Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998), hal. 11

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Gus Dur menempatkan keadilan sebagai tanggung jawab moral yang bersumber dari ajaran agama, sehingga menegakkan keadilan menjadi kewajiban setiap individu. Menurutnya, keadilan dapat diwujudkan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan kultural. Pendekatan struktural mencakup perubahan sistematis terhadap institusi dan aturan yang menimbulkan ketidakadilan, misalnya melalui legislasi, keputusan hukum, dan birokrasi yang adil.

Gus Dur mengimplementasikan pendekatan ini dengan mencabut TAP MPRS 1966 tentang Pelarangan PKI serta melakukan rekonsiliasi terhadap tahanan politik dari berbagai kelompok, bukan karena mendukung ideologi mereka, tetapi untuk menegakkan martabat manusia secara universal¹²⁰

Sementara itu, pendekatan kultural menekankan pembentukan kesadaran, budaya, dan pengetahuan masyarakat agar keadilan dapat ditegakkan secara berkelanjutan.¹²¹ Gus Dur mencontohkan hal ini melalui pendampingan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, menunjukkan komitmennya pada keadilan sosial. Dengan demikian, perjuangan Gus Dur dalam menegakkan keadilan selaras dengan sila ke-5 Pancasila, yakni mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena berfokus pada pemerataan hak, penghormatan martabat manusia, dan perlakuan adil tanpa diskriminasi.

¹²⁰ Meskipun UUD 1945 telah dilakukan amandemen setidaknya empat kali dan secara hukum TAP MPR dan MPRS tidak berlaku lagi, tetapi TAP MPRS No. 25 tahun 1966 ini sampai sekarang masih menjadi inspirasi dan bahkan menjadi konsideran bagi berbagai UU, Peraturan atau regulasi di berbagai tingkatan dan bahkan Peraturan Daerah (PERDA) di beberapa tempat untuk membatasi kebebasan berpolitik warga negara tertentu.

¹²¹ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). hal. 388

BAB IV

IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN DALAM PRESPEKTIF GUS DUR

A. Sila Pertama Dalam Pancasila Menurut Perspektif Gus Dur

1. Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki posisi sentral dalam bangunan filsafat Pancasila karena ini akan menjadi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi sila-silanya. Sila ini bukan sekedar pertanyaan keimanan, tetapi keimanan mengandung pandangan filosofis yang mendalam tentang relasi manusia dengan Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi universal, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Gus Dur, pengalaman keagamaan dan spiritualitas manusia tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat formal agama tertentu. Baik agama maupun pengalaman kerohanian di luar dinding agama sama-sama memiliki nilai mendalam bagi individu yang menghayatinya, sebab keduanya merupakan pengalaman batin yang bersifat personal dan autentik.¹²²

Tidak ada ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai kedalaman pengalaman spiritual seseorang, sebab pengalaman spiritual seseorang, sebab pengalaman tersebut sepenuhnya bergantung pada tingkat penyatuan batin individu dengan sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Apakah itu Allah, Yesus Kristus, Sang itu dirasakan sebagai sesuatu yang sangat menentukan arah, makna, dan bentuk kehidupan pribadi yang mengalaminya.¹²³

¹²² K.H. Abdurrahman Wahid, "Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan," <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, di akses tanggal 9 Oktober 2025

¹²³ K.H. Abdurrahman Wahid, "Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan," <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>

Meditasi seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khalwat seorang sufi, maupun retreat yang dijalani oleh seorang paator, seluruh pengalaman tersebut bersifat sangat subjektif. Pengalaman spritual semacam itu tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh orang lain, terlebih oleh mereka yang berbeda keyakinan. Namun, di balik subjektivitas yang begitu mendalam dan luas jangkauannya, tersimpan pula suatu bentuk objektivitas, yakni kesadaran mendasar manusia Indonesia sejak masa lampau akan keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta.¹²⁴

Keberadaan sesuatu yang bersifat mutlak dan menentukan posisi manusia secara mendasar, pada akhirnya meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam diri kita. Pengaruh utama tersebut tampak dalam bentuk keterlibatan batin terhadap Yang Maha Luhur dan Maha Agung sebagai Pencipta seluruh kehidupan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila rangkaian pengalaman spiritual bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam jumlah yang begitu banyak dan ragam yang begitu luas melahirkan kesadaran kolektif akan keberadaan sesuatu yang suci dan agung. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong para pendiri bangsa merumuskan konsep *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yang kini menjadi sila pertama Pancasila. Rumusan tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia yang lahir dari keberagaman pengalaman dan keyakinan seluruh warganya.¹²⁵

Jika dilihat dari perspektif tersebut, Pancasila sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, Pancasila justru merepresentasikan pengalaman keberagaman yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, sekaligus mengakomodasi pengalaman spiritual yang tidak selalu terkait dengan agama

[saling-bertentangan/](#), di akses tanggal 9 Oktober 2025

¹²⁴ K.H. Abdurrahman Wahid, "*Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan*,"

¹²⁵ K.H. Abdurrahman Wahid, "*Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan*," <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, di akses tanggal 9 Oktober 2025

tertentu. Semua itu dirumuskan dalam suatu dasar yang dapat menjadi pedoman hidup bersama bagi seluruh pemeluk agama maupun para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁶

Pancasila merupakan titik kesempatan fundamental dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa dasar ini, sejarah menunjukkan akan muncul pertentangan antarumat beragama, baik dalam satu agama maupun antaragama. Nilai kasih sayang dan persaudaraan yang diajarkan agama sering berubah menjadi konflik akibat kepentingan mempertahankan serta memperluas pengaruh lembaga keagamaan. Kedamaian tidak akan tercapai tanpa adanya titik kesepakatan. Sejarah bangsa lain maupun bangsa kita sendiri menunjukkan bahwa pertentangan antarumat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kerap menimbulkan peristiwa memilukan.¹²⁷

Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipahami hanya melalui sila pertama, sebab hal itu justru mempersempit maknanya. Seluruh sila Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh, agar kehidupan beragama berkembang secara selaras dan seimbang, tidak hanya menonjol pada aspek ibadah semata. Pancasila sebagai satu kesatuan sila-sila tidak bertentangan dengan agama, melainkan menjadi kerangka pengembangan bagi kehidupan beragama. Seperti kerangka moral dan institusional lainnya, Pancasila memiliki batasan ruang gerak tertentu bagi nilai-nilai yang diwadahnya.¹²⁸

Dengan hadirnya Pancasila, setiap penganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dituntut untuk menahan diri dan tidak bersikap egois demi kepentingan

¹²⁶ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan,”*

¹²⁷ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan,”*

¹²⁸ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan,”* <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, di akses tanggal 9 Oktober 2025

agamanya sendiri. Mereka harus mampu memahami, menghormati, dan memberi kebebasan kepada ekspresi keagamaan lain demi menjaga persatuan bangsa. Sikap ini menjadi pilihan bijak agar terhindar dari konflik antaragama yang dapat merusak kehidupan bersama. Selain menuntut sikap toleran terhadap pemeluk agama dan penghayat kepercayaan lain, setiap warga negara juga harus menerima Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa. Agama menjadi sumber moral bagi Pancasila, sehingga nilai-nilainya tetap diperhitungkan secara universal dalam pembentukan undang-undang, namun proses perumusannya tetap dilakukan secara rasional dan independen. Dalam kondisi demikian, hukum agama berlaku secara moral dan dijalankan atas kesadaran umat tanpa campur tangan negara, kecuali jika sejalan dengan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan begitu, hubungan antara agama, Pancasila, dan umat beragama membentuk segitiga yang tidak sebangun.¹²⁹

2. Tafsir Filosofis Gus Dur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi ruang diskusi yang penting di tengah realitas Indonesia yang majemuk. Gus Dur menawarkan tafsir filosofis yang melihat ketuhanan bukan hanya sebagai pengakuan teologis, tetapi sebagai prinsip etis yang menjamin kebebasan berkeyakinan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui gagasannya, Ketuhanan Yang Maha Esa dipahami sebagai fondasi moral yang mendukung kehidupan demokratis dan plural di Indonesia.

Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber moral bagi Pancasila, baik dalam pembentukan semangat hukum maupun dalam tatanan moral umat beragama. Dengan berlandaskan nilai ketuhanan yang universal, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam

¹²⁹ K.H. Abdurrahman Wahid, *"Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan,"*

penyusunan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan individu dan bangsa secara kolektif.¹³⁰ Banyak kalangan agama dan kepercayaan menilai bahwa Pancasila sebaiknya membatasi perannya sebatas pengatur minimal kehidupan beragama dan berkepercayaan, yakni hanya berfungsi sebagai “pengarah lalu lintas” hubungan antarumat beragama.¹³¹

Kesulitannya terletak pada kebutuhan akan aturan bersama yang mengatur hubungan antarumat beragama. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar pembuat aturan dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan batasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kehendak agama atau kepercayaan tertentu. Tugas bangsa saat ini adalah menegaskan batas wewenang Pancasila agar tidak mengganggu kebebasan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, dalam Islam diyakini bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam.¹³²

Banyak umat Islam menolak gagasan bahwa semua agama sama. Jika Pancasila menuntut persamaan mutlak, hal itu dapat mengganggu independensi teologis Islam. Namun, bila Pancasila mampu menemukan titik temu di antara perbedaan, ia berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan tanpa meniadakan kedaulatan agama. Karena itu, rumusan yang lebih tepat ialah “semua agama diperlakukan sama di hadapan hukum dan negara.”¹³³

¹³⁰ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan,” <https://gusdur.net/Pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, di akses tanggal 9 Oktober 2025

¹³¹ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, di akses tanggal 9 Oktober 2025

¹³² K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

¹³³ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Dari gambaran di atas posisi Pancasila secara alami menimbulkan ketegangan kreatif dalam kehidupan bangsa. Upaya menutupi perbedaan antara wawasan Pancasila dengan pandangan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan justru mengaburkan peran strategis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹³⁴

Dalam menelaah perbedaan perspektif antara Pancasila dan beragam agama maupun sistem kepercayaan terkait Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat sejumlah aspek fundamental yang perlu dikaji secara mendalam. Pembahasan atas persoalan tersebut harus diawali dengan kesadaran akan perbedaan latar belakang historis, teologis, dan konseptual yang melekat pada masing-masing agama dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu berperan sebagai sarana untuk menafsirkan dan menjembatani pandangan mendasar setiap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Istilah “Esa” dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 pun pada akhirnya dipahami secara berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing agama.¹³⁵

Dalam pandangan Islam, tidak terdapat pemisahan antara otoritas keagamaan dan otoritas kenegaraan. Karena itu, secara kelembagaan, Islam justru membuka ruang bagi keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan umat. Semakin besar perhatian pemerintah terhadap urusan umat Islam dianggap semakin baik.¹³⁶

Namun persoalan yang muncul bukan pada keterlibatan negara itu sendiri, melainkan pada arah kebijakan yang

¹³⁴ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” ” <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/> , di akses tanggal 9 Oktober 2025

¹³⁵ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

¹³⁶ K.H. Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

diambilnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kedudukan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” dapat berpotensi menggantikan ajaran-ajaran agama dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya sekularisme yang secara tegas ditolak dalam ajaran Islam. Sebab, hukum-hukum Islam (fiqh) merupakan bentuk konkret dari ajaran Tuhan yang bernilai tinggi, sehingga tidak sepatutnya digantikan oleh prinsip-prinsip lain yang berasal dari luar ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹³⁷

Persoalan tersebut sebenarnya tidak menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, karena dalam Islam tidak terdapat pemisahan antara otoritas keagamaan dan otoritas kenegaraan. Oleh sebab itu, secara kelembagaan, Islam justru membuka peluang bagi negara untuk turut berperan dalam kehidupan umat.¹³⁸ Dalam pandangan ini, semakin banyak urusan keumatan yang diatur oleh negara, dianggap semakin baik.

Walaupun Pancasila dan UUD 1945 tidak secara eksplisit merujuk pada ajaran agama tertentu, nilai-nilai etis yang bersumber dari Islam tetap memiliki ruang untuk diaktualisasikan sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesiediaan organisasi-organisasi Islam untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal baru dapat tercapai setelah negara memperlihatkan konsistensi dan kejelasan sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologis yang inklusif dan tidak bertentangan dengan

¹³⁷ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*

¹³⁸ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”* <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, di akses tanggal 10 Oktober 2025

nilai-nilai keagamaan.¹³⁹

Oleh karena itu, seluruh produk hukum dan kebijakan yang didasarkan pada Pancasila bersifat duniawi. Secara teoritis, kedudukan Pancasila sebagai asas tunggal, ideologi bangsa, dan falsafah negara tidak mengancam supremasi teologis agama. Dengan kata lain, Pancasila tidak dapat disejajarkan atau dipertentangkan dengan agama karena tidak memiliki sifat kebenaran mutlak sebagaimana agama.¹⁴⁰

Pemahaman terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa hingga kini masih menyisakan persoalan yang kompleks. Contohnya dapat dilihat pada isu perkawinan antaragama. Dalam ajaran Islam, pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim jelas dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Pancasila memandang dan menanggapi keputusan hukum agama tersebut. Jika larangan tersebut diterapkan secara mutlak sesuai ketentuan Islam, maka akan muncul kebutuhan untuk mengatur fenomena tersebut secara hukum, mengingat praktik perkawinan antaragama telah terjadi cukup luas dalam masyarakat.¹⁴¹

Dengan mempertimbangkan hubungan kompleks antara Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus falsafah negara yang terealisasi melalui asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi dengan keberadaan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka diperlukan upaya pengembangan pemikiran untuk

¹³⁹ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*

¹⁴⁰ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*

¹⁴¹ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”* <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, di akses tanggal 10 Oktober 2025

menemukan nilai-nilai dasar bagi kehidupan kebangsaan. Pada titik ini, pertanyaan mengenai apakah nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari agama atau sebaliknya sudah tidak relevan lagi, sebab ajaran agama tetap menjadi rujukan moral bagi Pancasila, sementara Pancasila sendiri berfungsi sebagai “pengatur lalu lintas” yang menjamin seluruh elemen bangsa dapat menempuh jalan kehidupan bersama secara adil tanpa terkecuali.¹⁴²

Jika Pancasila benar-benar bersikap netral dan tidak memihak salah satu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia, maka tidak akan timbul persoalan apapun. Namun, situasi yang berbeda dapat muncul ketika muncul anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap satu kelompok tertentu. Hal ini, misalnya, tampak dalam keluhan yang disampaikan oleh kalangan Katolik dan Kristen terkait pengajuan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU-PA) ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang mereka nilai memberikan keistimewaan khusus bagi umat Islam dan merugikan posisi umat non-Muslim.¹⁴³

Meskipun agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki perbedaan dalam lembaga maupun orientasi hidup, seluruhnya tetap mengandung nilai-nilai universal yang sejalan. Di balik keragaman tersebut, terdapat penekanan yang sama terhadap kejujuran dalam sikap dan perilaku, keikhlasan serta ketulusan dalam tindakan, serta keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai mendasar semacam ini dapat diidentifikasi sebagai etos bersama yang disepakati, dan selanjutnya dijadikan landasan moral bagi kehidupan bersama.¹⁴⁴

¹⁴² K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Khidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*

¹⁴³ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Khidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”* <https://gusdur.net/Pancasila-sebagai-ideologi-dalam-kaitannya-dengan-kehidupan-beragama-dan-berkepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/>, di akses tanggal 10 Oktober 2025

¹⁴⁴ K.H. Abdurrahman Wahid, *“Pancasila Sebagai Ideologi dalam*

Dalam konteks agama sebagai sumber nilai bagi Pancasila, terutama pada sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, wajar apabila nilai-nilai luhur agama menjadi bagian dari Pancasila. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam mengatur hubungan antarorganisasi, antargolongan, dan antaragama. Tanpa adanya penyerapan nilai-nilai tersebut, hubungan antarkelompok dan antaragama akan kehilangan arah karena tidak memiliki standar moral yang menjadi pedoman bersama.¹⁴⁵

Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan maupun kekuatan sosial-politik menuntut adanya langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Namun demikian, gagasan yang menempatkan Pancasila sebagai standar normatif dalam membangun relasi antar unsur kehidupan berbangsa merupakan prinsip yang secara rasional dapat diterima.¹⁴⁶

3. Dimensi Universal Sila Pertama

Pemikiran Gus Dur mengenai universalisme Islam memiliki landasan filosofis yang bersinggungan dengan dimensi universal Sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang menempatkan nilai ketuhanan bukan semata sebagai ajaran doktrinal-teologis, tetapi sebagai landasan etis universal yang melintasi batas keagamaan. Dalam gagasannya, universalisme Islam ditopang oleh perlindungan terhadap lima hak dasar manusia hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak milik, dan hak berkeluarga yang mencerminkan bahwa prinsip ketuhanan dalam Islam memiliki orientasi langsung pada peneguhan martabat manusia, sebagai entitas yang memiliki kebebasan, akal budi, dan kehendak.¹⁴⁷

Kaitannya dengan Khidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

¹⁴⁵ K.H. Abdurrahman Wahid, “*Islam, Negara, dan Pancasila*” <https://gusdur.net/islam-negara-dan-pancasila/>, akses tanggal 10 Oktober 2025

¹⁴⁶ K.H. Abdurrahman Wahid, “*Islam, Negara, dan Pancasila*”

¹⁴⁷ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan bekerja sama dengan Ma’arif Institute, 2009), hal. 246.

Dengan demikian, ketuhanan tidak dipahami sekadar sebagai relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, melainkan juga relasi horizontal yang menuntut keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kebebasan manusia sebagai konsekuensi emanasi Tuhan. Pandangan ini paralel dengan dimensi universal Sila Pertama yang memandang ketuhanan sebagai sumber moral publik serta standar etik bersama bagi penyelenggaraan kehidupan sosial, hukum, dan kekuasaan politik. Konsep ketuhanan yang universal sebagaimana diekspresikan Gus Dur menghadirkan narasi bahwa agama, yang pada level teologis memiliki klaim kebenaran masing-masing, pada level praksis sosial berkewajiban melahirkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi.¹⁴⁸

Nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi universalisme Islam kemudian menemukan ruang praksisnya dalam masyarakat Indonesia yang multietnis, multiagama, dan plural secara budaya. Ketuhanan dalam perspektif Gus Dur bukanlah agen penyeragaman, melainkan prinsip transendensi yang memberi ruang bagi keberagaman untuk tumbuh sebagai kekayaan koeksistensi dan bukan sebagai sumber fragmentasi sosial. Pandangan ini menempatkan agama bukan sebagai kekuatan hegemonik yang menyingkirkan yang lain, tetapi sebagai ruang dialog yang membiarkan perbedaan hadir tanpa harus meniadakan identitas. Dimensi universal Sila Pertama dengan demikian dipahami sebagai norma fundamental yang menata ruang publik agar tidak didominasi doktrin keagamaan tertentu, tetapi tetap menjadikan nilai ketuhanan sebagai etika bersama yang meneguhkan atas hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak berkeluarga.¹⁴⁹

Dengan demikian, universalisme Islam versi Gus Dur dapat dibaca sebagai penafsiran progresif terhadap sila

¹⁴⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. xxiii.

¹⁴⁹ As'ad Said Ali, —Pengantar Ahli: Konstruksi Pemikiran Gus Durl, dalam Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), hal. 13.

pertama yang tidak menutup diri terhadap partikularitas agama, namun justru mengafirmasi keragaman tersebut sebagai bagian dari mekanisme sosial yang dikehendaki oleh nilai-nilai ketuhanan yang beradab. Pemikiran ini menjadi pijakan epistemologis bagi rumusan konsep ketuhanan yang inklusif dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang memberi ruang bagi pluralitas ekspresi keimanan, melindungi martabat manusia, serta menopang terbangunnya kehidupan berbangsa yang demokratis, toleran, dan setara.

B. Konsep Keberagaman dan Pluralisme Agama dalam Pandangan Gus Dur

1. Konsep Tauhid Inklusif

Pemahaman tauhid dalam tradisi Islam pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai pengakuan atas keesaan Tuhan dalam dimensi teologis, tetapi juga memuat konsekuensi sosial terhadap relasi manusia sebagai makhluk yang sama-sama tunduk kepada Tuhan Yang Esa. Pemikiran Gus Dur mengenai keberagaman berangkat dari kedalaman makna tauhid itu sendiri. Bagi Gus Dur, tauhid tidak boleh dipahami sebagai konsep yang mengurung manusia dalam klaim eksklusif keagamaan, tetapi justru harus melahirkan kesadaran bahwa seluruh manusia berada dalam posisi setara di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar gagasan tauhid inklusif dalam pemikiran beliau. Tauhid yang dibangun atas kesadaran rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, sebagaimana dijelaskan dalam disiplin ilmu ketuhanan dalam Islam, bukan hanya pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam, tetapi juga mendorong manusia untuk menyadari keterhubungan universal bahwa seluruh ciptaan berada dalam ruang kesatuan kehendak Tuhan.¹⁵⁰ Kesatuan inilah yang menjadi basis moral untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Jika Allah adalah Pencipta semua makhluk, maka keberadaan keragaman manusia, suku, budaya, bahkan agama adalah bagian dari kehendak dan sunnatullah. Dengan demikian, sikap saling

¹⁵⁰ Hilfah Chaniago, "Filsafat Tauhid Prespektif Abdurrahman Wahid" dalam *Mikraf* Vol. 5, No. 2 Desember 2024 hal. 42.

memusuhi atas dasar agama merupakan bentuk pemahaman tauhid yang tidak utuh.

Objek ilmu mencakup aspek empiris maupun non empiris; karena itu, teologi yang mengkaji tentang Tuhan juga diposisikan sebagai disiplin ilmu sebagaimana ilmu lainnya. Istilah tauhid berasal dari akar kata *ahad* dan *wahid*, keduanya merupakan nama Allah SWT yang menegaskan keesaan-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah Al-Ikhlâs ayat.¹⁵¹ Gus Dur melihat agama tidak boleh berdiri kaku sebagai doktrin metafisik yang terpisah dari realitas sosial. Tauhid inklusif justru meniscayakan dialog antara keyakinan keagamaan dan kehidupan empiris yang majemuk.

Setiap agama memiliki keyakinan tersendiri tentang Tuhannya. Pada hakikatnya, agama merupakan pedoman ketuhanan yang membimbing umatnya untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang ketuhanan menjadi ajaran pokok dalam setiap agama. Sebagai contoh, pemahaman ketuhanan dalam Kristen menjadi ajaran utama bagi pemeluknya, begitu pula dalam Buddha, dan berlaku sama bagi agama-agama lainnya, termasuk Islam. ini selaras dengan gagasan Gus Dur bahwa perbedaan keyakinan adalah realitas teologis yang harus dihormati, bukan ancaman yang harus diseragamkan.

Theologi” diartikan sebagai “*the Science which treats of the relation between God and man*” (ilmu yang membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia). *Theologi* diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia Gus Dur melihat tauhid tidak berhenti pada relasi vertikal (manusia Tuhan), tetapi juga relasi horizontal (manusia-manusia). Konsep tauhid inklusif lahir dari kesadaran bahwa keesaan Tuhan berimplikasi pada kesetaraan manusia.

Teologi Islam merupakan ajaran mengenai Ketuhanan

¹⁵¹ Hadis Purba and Salamuddin, ‘Purba Dan Salamuddin 2016 *Teologi Islam Ilmu Tauhid*’, 2016, hal.143-48.

dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menyeru manusia untuk mengesakan Allah Swt.¹⁵² Ini membantu menunjukkan bahwa pembahasan Gus Dur tidak sedang mengganti makna tauhid, tetapi memperluas konsekuensi dari ajaran keesaan Tuhan ke ranah sosial pluralistik.

Gus Dur mempromosikan gagasan pluralisme dan toleransi antaragama memperjuangkan hak-hak minoritas. Hal ini termasuk gereja dan kelompok non Muslim lain di Indonesia. Secara intelektual, ini merujuk pada gagasan para filsuf dan pemikir seperti John Locke, Immanuel Kant, serta tokoh pluralis Muslim seperti Mohammad Natsir. Di sini dapat dijelaskan bahwa perjuangan Gus Dur bukan sekadar politik, tetapi memiliki fondasi teologis berasal dari pemaknaan tauhid.

2. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman

Dalam konteks hubungan antar budaya dan antar agama, perbedaan cara hidup merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena setiap masyarakat memiliki landasan nilai serta orientasi yang berbeda. Islam sebagai sebuah jalan hidup (*syari'ah*) memberikan ruang bagi adanya keragaman tersebut. Perbedaan pandangan adalah wajar sebagai akibat dari akal, kebebasan, dan budaya yang dimiliki masing-masing manusia. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dibenarkan jika berujung pada perpecahan dan konflik antar kelompok.

Persatuan di tengah perbedaan perlu diwujudkan melalui kesadaran untuk hidup berdampingan tanpa saling menegasikan. Karena itu, variasi dalam gaya maupun prinsip hidup merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an. "Dan telah Ku buat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kalian saling mengenal (*wa ja'alnâkum syu'ûban waqabâila li ta'ârafû*)" (*QS alHujurat* (49):13). Perbedaan cara pandang

¹⁵² Hilfah Chaniago, "Filsafat Tauhid Perspektif Abdurrahman Wahid", Vol. 5, No. 2 Desember 2024

adalah sesuatu yang lumrah dan pada hakikatnya dapat menambah kekayaan dalam kehidupan sosial, sehingga tidak selayaknya dipandang sebagai bahaya. Kenyataan tersebut turut menjadi bagian dari keragaman budaya dan politik di kalangan berbagai kelompok muslim.¹⁵³

Yang dilarang oleh agama Islam adalah perpecahan, bukannya perbedaan pendapat. Kitab suci al-Qur'ân menyatakan ; “Berpeganglah kalian pada tali Allah, dan jangan terpecahpecah (wa'tashimû bi hablillâh jamîan wa lâ tafarraqu)” (QS Ali Im ran (3): 103).¹⁵⁴ Ajaran Islam secara tegas membedakan antara perbedaan pendapat dengan perpecahan. Perbedaan tidak dilarang, namun perpecahan adalah sesuatu yang ditolak. Perintah untuk berpegang pada tali Allah dan larangan untuk terpecah belah menunjukkan bahwa agama tidak menginginkan hilangnya identitas, tetapi menolak konflik yang lahir dari klaim kebenaran yang arogan dan merendahkan kelompok lain. Ketika sebagian kecil kelompok yang mengatasnamakan agama menolak perbedaan pendapat dan menjadikan kekerasan sebagai alat legitimasi, mereka sejatinya bertentangan dengan spirit Islam yang menghargai keberagaman. Penolakan terhadap kekerasan menjadi bagian penting dalam meneguhkan prinsip persatuan dalam masyarakat yang majemuk.

Dengan demikian, persatuan dalam keberagaman bukan dibangun atas dasar keseragaman pendapat, keyakinan, maupun budaya, tetapi bertumpu pada pengakuan terhadap perbedaan serta komitmen untuk tidak memaksakan suatu identitas kepada pihak lain. Prinsip ini menjadi fondasi etis dan sosial dalam mempertahankan keharmonisan kehidupan bersama, terutama di tengah masyarakat yang plural seperti Indonesia. Kesadaran bahwa perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, sementara perpecahan adalah sesuatu yang harus dihindari, menjadi

¹⁵³ Abdurrahman Wahid, “*Islamku Islam Anda Islam Kita*” (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), Hal. 351

¹⁵⁴ Abdurrahman Wahid, “*Islamku Islam Anda Islam Kita*” (Jakarta: Democracy Project: 2011) Hal.352

inti dari upaya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa tanpa harus meniadakan keberagaman yang ada.¹⁵⁵

C. Implementasi Nilai Ketuhanan dalam Konteks Bernegara

1. Penerapan Nilai Ketuhanan dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Nilai ketuhanan dalam pandangan Islam menempati posisi fundamental dalam menegakkan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut secara tegas dalam QS an-Nisā' ayat 135, yang memerintahkan umat beriman untuk menegakkan keadilan secara objektif meskipun harus berhadapan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok.¹⁵⁶ Perintah ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif ketuhanan bukan sekadar konstruksi sosial, tetapi merupakan tuntutan moral yang bersumber dari perintah Tuhan. Dengan demikian, penerapan keadilan dalam kehidupan bernegara tidak dapat dipisahkan dari nilai teologis yang melandasinya, yakni bahwa setiap tindakan keadilan merupakan manifestasi ketaatan kepada Tuhan.

Selain menyangkut prinsip, al-Qur'an juga memberikan pedoman prosedural dalam praktik keadilan. QS al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan penggunaan bukti tertulis dalam transaksi, menjadi dasar penting bagi sistem administrasi dan penegakan hukum yang transparan. Prinsip ini memiliki relevansi nyata dalam tata kelola pemerintahan modern yang menuntut akuntabilitas, pencatatan resmi, dan keterbukaan administrasi untuk mencegah kecurangan dan ketidakadilan. Di sisi lain, tuntunan hadis Nabi yang menyatakan *idra'ū al-hudūd bi al-syubuhāt* menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman tidak boleh dilakukan apabila terdapat keraguan yang dapat merugikan seseorang tanpa kepastian hukum.¹⁵⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan pentingnya pembuktian yang

¹⁵⁵ Abdurrahman Wahid, "Islamku Islam Anda Islam Kita", hal. 352

¹⁵⁶ Abdurrahman Wahid, "Islamku Islam Anda Islam Kita" hal. 92

¹⁵⁷ Abdurrahman Wahid, "Islamku Islam Anda Islam Kita" hal. 93

adil dalam proses peradilan modern.

Dalam skala yang lebih luas, penerapan nilai ketuhanan terhadap keadilan mencakup tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kaidah fikih *tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, bukan kepentingan segelintir pihak.¹⁵⁸ Ini menjadi dasar etis bagi arah pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar kemajuan teknologi dan modernisasi, tetapi memastikan pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara berkeadilan.

Dengan demikian, nilai ketuhanan tidak berhenti pada dimensi spiritual, tetapi memiliki implikasi konkret terhadap sistem hukum, tata kelola pemerintahan, formulasi kebijakan publik, serta orientasi pembangunan yang berkeadilan. Ketuhanan dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana keadilan menjadi ekspresi nyata keberagamaan dan komitmen moral manusia dalam ruang sosial dan kenegaraan.¹⁵⁹ Dalam konteks ini, penerapan nilai Ketuhanan dalam kehidupan bernegara meniscayakan hadirnya keadilan substantif dan prosedural sebagai fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang sejahtera, beradab, dan bermartabat.

2. Hubungan Agama dan Negara (Aplikasi Sila Pertama)

Hubungan antara agama dan negara merupakan aspek penting dalam penerapan nilai Ketuhanan dalam konteks kenegaraan. Sejarah pergerakan umat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa proses ini tidaklah sederhana, karena selalu diwarnai oleh perbedaan pandangan dan interpretasi agama. Beberapa peristiwa, seperti Kongres Umat Islam, menegaskan perlunya persatuan umat dalam menghadapi tantangan sosial politik, sekaligus menekankan prinsip *li i'laa'i*

¹⁵⁸ Abdurrahman Wahid, "*Islamku Islam Anda Islam Kita*" hal.94

¹⁵⁹ Abdurrahman Wahid, "*Islamku Islam Anda Islam Kita*"

kalimaatillahi hiyal 'ulyaa, yakni menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi dalam kehidupan bersama.¹⁶⁰ Persatuan ini menuntut umat Islam untuk menempatkan kepentingan moral dan religius di atas kepentingan kelompok sempit, sehingga prinsip ketuhanan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun, dinamika internal umat Islam menunjukkan bahwa penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial tidak lepas dari konflik interpretasi. Perbedaan sikap terhadap praktik-praktik keagamaan, seperti ziarah kubur atau penghormatan terhadap tokoh tertentu, sering kali menimbulkan pertentangan. Hal ini menegaskan pentingnya refleksi dan otokritik dalam umat beragama, agar praktik keagamaan dapat selaras dengan prinsip moral yang mendasari kehidupan sosial dan kenegaraan.¹⁶¹ Kesadaran akan nilai ketuhanan sebagai landasan moral memungkinkan umat Islam dan penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan sosial dan menghormati hak-hak setiap warga negara.

Seiring waktu, hubungan Islam dengan negara memunculkan berbagai responsi dari kelompok-kelompok Islam. Secara garis besar, terdapat tiga model: responsi integratif, di mana ajaran agama dijalankan secara kultural tanpa keterikatan formal dengan negara; responsi fakultatif, di mana kelompok Islam berusaha memengaruhi undang-undang dan kebijakan negara sesuai ajaran Islam jika memiliki kekuatan politik; dan responsi konfrontatif, yang menolak keberadaan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

¹⁶⁰ K.H. Abdurrahman Wahid, "Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara" <https://gusdur.net/3990-2/>, akses tanggal 10 Desember 2025

¹⁶¹ K.H. Abdurrahman Wahid, "Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara" " <https://gusdur.net/3990-2/>, akses tanggal 10 Desember 2025

Model-model ini menunjukkan bagaimana nilai Ketuhanan dapat diaplikasikan dalam konteks kenegaraan secara berbeda, tergantung pada posisi dan strategi kelompok agama, serta hubungan mereka dengan struktur negara.¹⁶²

Penerapan nilai Ketuhanan dalam hubungan agama dan negara tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Nilai-nilai ketuhanan menuntun negara untuk menciptakan kebijakan yang adil, menghormati pluralitas, dan memastikan kesejahteraan seluruh warga, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman etis dan moral, yang mengarahkan negara dan masyarakat untuk menegakkan keadilan sosial, menghormati hak-hak warga, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan bangsa secara keseluruhan.

¹⁶² K.H. Abdurrahman Wahid, *“Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara”*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan deskripsi peneliti pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menjawab permasalahan yang telah ditanyakan dalam rumusan masalah, yaitu Bagaimana pandangan Gus Dur dalam memahami sila pertama dan Bagaimana Gus Dur menafsirkan Ketuhanan dalam Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin tersebut, yaitu:

1. Dalam pemikiran Gus Dur, Pancasila sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, Pancasila justru merepresentasikan pengalaman keberagaman yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, sekaligus mengakomodasi pengalaman spiritual yang tidak selalu terkait dengan agama tertentu. Semua itu dirumuskan dalam suatu dasar yang dapat menjadi pedoman hidup bersama bagi seluruh pemeluk agama maupun para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berdasarkan penafsiran Gus Dur, Ketuhana Yang Maha Esa dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 pun padat akhirnya dipat dipahami secara berbeda menurut keyakinan masing-masing agama. Namun, di balik subjektivitas yang begitu mendalam dan luas jangkauannya, tersimpan pula suatu bentuk objektivitas, manusia meyakini bahwa kesadaran mendasar sejak masa lampau akan keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta.

B. Kritik dan Saran

Penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Gus Dur serta relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam aspek historis, filosofis, dan teologis dari praktik ketuhanan inklusif, terutama dalam konteks hubungan agama dan negara, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran agama dalam ruang publik.

1. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana pemikiran Gus Dur mengenai ketuhanan yang inklusif mampu memperkuat nilai toleransi dan persatuan nasional. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh penerapan gagasan tersebut dalam kebijakan publik, pendidikan keagamaan, ataupun gerakan sosial yang berfokus pada perlindungan kelompok minoritas.
2. Kajian yang menghubungkan pemikiran tokoh dengan filosofi dasar negara penting untuk terus dikembangkan. Penelitian mendatang dapat melibatkan studi perbandingan antara pemikiran Gus Dur dan tokoh pluralis lain, baik dari tradisi Islam maupun non-Islam, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih luas dalam memahami ketuhanan sebagai dasar moral kehidupan kebangsaan

Daftar Pustaka

- Arif, Syaful, "Gus Dur dan Ilmu Sosial Tranformasi Sebuah Biografi Intelektual", Koekoesan, 2009.
- Arif, Syaful, "*Humanisme Gus Dur*" Ar-Ruzz Media, 2013
- Aritonang, Arthur. "*Sejarah dan Perjalanan Sila Pertama Pancasila dari Era Orde Lama Sampai Era Reformasi.*"
- Atma, Hajri Wira, dkk. "*Meluruskan Penafsiran Tentang Pancasila.*"
- Ardhi, Muhlis. 2014. "*Implementasi Nilai-nilai Moral Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Etika Profesi Guru di SMP Negeri 2 Boyolali.*" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chaniago Hilfah. 2024. "Filsafat Tauhid Prespektif Abdurrahman Wahid."
- Dagur, Daniel. 2021. "*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia.*"
- Durriyya, Senja Tiarylla, dkk. 2023. "*Pancasila Sebagai Dasar Negara di Indonesia.*"
- Erman, S. Saragih, "*Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia.*"
- Gege, Agus Siswadi, "*Argumentasi Logis Tentang Eksistensi Tuhan dalam Wacana Filsafat Ketuhanan.*"
- Hatta, Bung. "*Merevisi Sila 'Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya.*" <https://www.unud.ac.id/in/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya>, diakses tanggal 28 Juni 2024.

- Kaelan. 2015. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paramadina.
- Kamarudin, Salleh Khoiruddin, "*Gus Dur Dan Pemikiran Liberalisem*."
- Khadziq. 2005. *Islam Budaya Lokal Memahami Realitas Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Kusumastuti, Kusuma dan Ahmad Mustamil Khoiron, "*Meode Penelitian Kualitatif*," hal. 2
- Mahilaveda, Annafikarno Nadila. "*Membongkar Esensi Dasar Sila Pertama Pancasila: Internalisasi Pemikiran Islam Mohammad Arkoun dalam Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa*."
- Maswan, dan Aida Farichatul Laila, "Tentang Gus Dur Manusia Multidimensional"
- Mestika, Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*." Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Napitupulu, Mawarni "Peran Kitab Keagamaan (Alkitab) Sebagai Upaya Membangun Toleransi Dalam Konflik Umat Beragama di Indonesia" *Jurnal Christian Humaniora*, Vol.6, No. 1, (Mei 2022)
- Oesman, Oetojo dan Alfian, "*Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*" BP-7 Pusat (Jakarta: 1990).
- Ramadhan, Kharul, "*Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Ditinjau dari Fiqih Syisah*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Regita, Suci Cahyani *"Implementasi Sila Pertama Pancasila Dalam Pembentukan Nilai Religius Siswa Kelas di Sekolah Dasar Negeri 5 Sukarara."* Universitas Hamzanwadi.
- Rochamt, Saefur "Pandangan KH Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Negara Pancasila" jurnal pendidikan dan Kebudayaan, No. 070, September 2022.
- Rifai, Muhammad, *"Gus Dur KH.Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009"*, Garasi, 2014.
- Salim dan Haidir, *"Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis"*, Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Septiana, Egi, "Catatan Gus Dur", *PersEbook369: Bandung, Eboook.No.05.10.05*.
- Siregar, dkk, *"Pembinaan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan yang Maha Esa Eks Pengguna Narkoba untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi"*.
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Wira Atma Hajri, dkk, *"Meluruskan Penaafsiran Tentang Pancasila."* *Jurnal Wedana* Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2019).
- Wahid, Abdurrahman, "Mengurai Hubungan Agama dan Negara (bab Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama)", *GusDur.net.*, <https://gusdur.net/pancasila-dan-kondisi-objektif-kehidupan-beragama/>, diakses tanggal 24 Desember 2024.

- Wahid, Abdurrahman, “Islam Indonesia: legitimasi dan Resistensi Kultural, Gus Dur di Era Orde Baru”, (bab Pancasila dan Ajaran Agama, Tidak Saling Bertentangan), *GusDur.net.*, <https://gusdur.net/pancasila-dan-ajaran-agama-tidak-saling-bertentangan/>, diakses tanggal 24 Desember 2024.
- Wahid, Abdurrahman, “Islam Indonesia: legitimasi dan Resistensi Kultural, Gus Dur di Era Orde Baru”, (bab Islam dan Pancasila: Titik Temu Ideologi Universal dan Ideologi Nasional), *GusDur.net.*, <https://gusdur.net/islam-dan-pancasila-titik-temu-ideologi-universal-dan-ideologi-nasional/>, diakses tanggal 24 Desember 2024.
- Wahid, Abdurrahman, “*Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*” LKiS Yogyakarta, Januari 2009.
- Wahid, Abdurrahman, “*Islamku Islam Anda Islam Kita*”, The Wahid Institute, Agustus 2006.
- Wahid, Abdurrahman, “*Gus Dur di Mata Wong Cirebon*”, Pilar Media: Anggota Ikapi, April 2010
- Wahid, Abdurrahman, “*Prisma Pemikiran Gus Dur*” LKiS Yogyakarta, 1999.